

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR LANDAK

---



RENCANA KERJA  
KEPOLISIAN RESOR LANDAK T.A 2021

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Polres Landak Tahun Anggaran 2021 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Landak Tahun 2020 dalam pentahapan yang akan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang tentunya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Landak terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah dan program kewilayahan melalui Visinya “**Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan sejahtera**” meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Mandiri dan Terdepan Secara Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Industri, Pembangunan Transportasi, Pelestarian Lingkungan dan Budaya serta Tatakelola Pemerintahan Yang Baik.

/ Untuk .....

Untuk menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tentunya Polres Landak akan bekerjasama dengan Forkopimda, Instansi terkait dan Swasta dalam meningkatkan pembangunan, Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas di wilayah Kabupaten Landak dengan tertib, aman dan kondusif, hal ini merupakan tugas Polri khususnya Polres Landak dalam melaksanakan Tugas Pokoknya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Disusunnya tahapan Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024 maka pemerintah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 guna **Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh Di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Dan Kemampuan Iptek Yang Terus Meningkat**, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah khususnya Polri dalam menyikapi isu Strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang diangkat dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan Nasional.

Sejalan dengan 5 (Lima) Visi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada periode tahun 2019-2024 adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya, melanjutkan Reformasi Birokrasi dan penggunaan APBN tepat sasaran. Hal ini tentunya Polri dalam kepemimpinan Kapolri Jendral Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si melakukan penguatan Polri yang Profesional, Modern, Terpercaya (Promoter) menuju Indonesia Maju dengan melanjutkan program Polri terdahulu melalui 7 (Tujuh) program Prioritas Kapolri yaitu; **Mewujudkan SDM yang kuat, Pemantapan Harkamtibmas, Penguatan Penegakan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan, Pemantapan Manajemen Media, Penguatan Sinergi Polisional dan Penataan Kelembagaan.**

/ Penyusunan .....

Dari 7 (Tujuh) program prioritas Kapolri dimaksud tentunya dijabarkan dan di implementasikan kedalam kinerja Polri sebagai penguatan Polri guna terwujudnya Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya pada Tahun 2021 yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentunya Polri khususnya Polres Landak dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2021 mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategy Polri 2005-2025, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1132/V/2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024, serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2021.

Dalam menunjang penataan kembali system pelayanan umum secara prima kepada masyarakat, maka perlu dilakukan Peningkatan kualitas dan Mentalitas Birokrasi pemerintah khususnya Satker Polres Landak terkait Pelayanan Publik termasuk peningkatan sarana dan prasana yang terarah, terpadu dan terkoordinasi. Hal ini guna meningkatkan kualitas pelayanan Publik sesuai tuntutan Reformasi, maka secara otomatis citra, wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Birokrasi Polri akan semakin meningkat, efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Satker Polres Landak Tahun Anggaran 2021 tentunya kelanjutan dari Rencana Kerja Satker Polres Landak Tahun Anggaran 2020, dimana dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Polres Landak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan Tata Kerja Satker Polres Landak yang tertuang dalam Perkap 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang dalam implementasinya harus dapat memberikan kontribusi pelayanan sampai pada komunitas terkecil ditingkat Polsubsektor dalam rangka mewujudkan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat.

/ Memasuki .....

Memasuki tahun 2021 tersebut, dilihat dari perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan dalam RAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dalam jangka menengah tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur RAPBN jangka menengah, hal ini tentunya akan berdampak kepada RAPBD di kewilayahan khususnya Kabupaten Landak, jika tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer.

Perkembangan lingkungan Strategis yang syarat dengan isue Global (Demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup) serta kemajuan pesat dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mendorong terjadinya perubahan yang cepat disemua aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks pergaulan antar negara maupun skala Nasional. Fenomena tersebut berpengaruh terhadap perkembangan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dibidang Ideologi, Sosial Politik, ekonomi, budaya maupun keamanan, dimana kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk kualitas, kuantitas maupun mobilitas gangguan kamtibmas.

Secara umum situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Landak sangat ditentukan oleh kondisi geografis, Demografis dan Sumber Daya Alam serta ancaman terhadap perkembangan lingkungan Strategis yang bersumber dari Aspek Ipoleksosbudkam. Dari Aspek Kamtibmas wilayah Kabupaten Landak memiliki potensi yang sangat terbuka untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai trend ancaman, dari yang hanya bersifat lokal kemudian dengan sangat cepat meningkat menjadi ancaman Regional, Nasional bahkan Internasional/Global, demikian sebaliknya seringkali terjadi Instabilitas Kamtibmas bersumber dari ancaman yang bersifat Transformasi Issue Internasional yang sesungguhnya tidak terkait langsung dengan kepentingan wilayah Kabupaten Landak.

/ Hakekat .....

Hakekat ancaman pada tahun 2021 diperkirakan akan semakin meningkat dan semakin kompleks, yang mencakup segala permasalahan dan bentuk potensi keamanan di Indonesia, yang merupakan rangkaian dari pasca pemilu akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan dengan adanya ketidakpuasan atas hasil Pemilu Tahun 2020 yang dilakukan oleh para pasangan calon melalui partai pendukung dan pendukung partai Politik, sedangkan Tahun ini Kabupaten Landak tidak ikut dalam Pemilu di Tahun 2020. sejalan dengan apa yang telah diprogramkan pemerintah pada kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sebagai prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi dan berkepribadian serta kebudayaan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi gangguan Kamtibmas yang mempengaruhi stabilitas keamanan dalam Negeri diantaranya:

- a. **Ancaman Terorisme.** Banyaknya jalur lintas pelayaran dan keberadaan berbagai instalasi obyek vital strategis baik di laut maupun di darat, memungkinkan digunakannya obyek tersebut sebagai wahana oleh jaringan terorisme dalam menjalankan aksinya. Aksi teror ini dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstrim baik dari dalam maupun luar negeri untuk mencapai tujuan politiknya, maupun aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan terorisme internasional;
- b. **Gerakan Separatisme.** Gerakan separatisme merupakan ancaman faktual bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Ancaman ini datang dan didominasi oleh faktor dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan. Kekuatan asing hadir secara terselubung dalam bentuk tindakan provokasi yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi serta yang paling ekstrim adalah penyelundupan bantuan senjata;
- c. **Transnational Crimes.** Kejahatan lintas negara yang meliputi, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata kerap memanfaatkan laut sebagai media untuk melaksanakan aktivitasnya. Jenis kejahatan tersebut merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian dan pertahanan keamanan negara. Dalam era globalisasi, tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dimanfaatkan

oleh negara lain untuk mengganggu kepentingan nasional Indonesia melalui jalur Perairan yang rawan akan masuknya barang-barang ilegal yang perlu diwaspadai khususnya daerah-daerah perbatasan di wilayah Kalimantan Barat.

- d. **Radikalisme**, adalah suatu Ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Wilayah Kabupaten Landak tidak terdapat **paham radikalisme**, namun di Kabupaten Landak masih **terindikasi** adanya perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap aliran agama yang dianut terkait adanya organisasi Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia (SSYI) yang tidak terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak. kegiatan yang dilakukan oleh organisasi SSYI, dimana sejauh ini belum dapat menimbulkan adanya keresahan dimasyarakat. Organisasi SSYI berada di wilayah Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Untuk menyikapi timbulnya ancaman yang akan menjadi gangguan kamtibmas dan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri, tentunya Polres Landak sebagai perpanjangan tangan Polri di Kabupaten Landak juga memperhatikan perkembangan dan perubahan pada stabilitas nasional yang tersusun dalam RPJMN dan RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Landak Tahun Anggaran 2021 dengan menentukan arah kebijakan dan strategi Polres Landak untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Landak serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta berkeadilan.

/ 2. Perkembangan .....

## 2. Perkembangan lingkungan Strategis Kabupaten Landak

Pengaruh krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional tentunya akan berpengaruh pada perekonomian di daerah yang tentunya berdampak pada terjadinya rasionalisasi pada perusahaan-perusahaan dalam upaya efisiensi proses produksi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk menyikapi terjadinya krisis ekonomi global di Tahun 2020 tentunya dilihat dari Kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Landak, yang akan dipengaruhi oleh beberapa Aspek yaitu **Aspek Statis** meliputi Geografi, Sumber Daya Alam, Demografi dan **Aspek Dinamis** meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Aspek Geografi

#### 1) Letak Wilayah

Kabupaten Landak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak yang saat ini menjadi Kabupaten Mempawah, dengan ibukotanya di Ngabang. Letak geografis Kabupaten Landak antara 0°01'53,55" Lintang Utara sampai 0°37'41,04" Lintang Selatan dan 109°12'13,44 Bujur Timur sampai 110°15'56,56" Bujur Timur. Kabupaten Landak memiliki 13 (Tiga Belas) Kecamatan dengan ibukotanya di Ngabang, dengan 156 Desa dan 713 Dusun. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Landak, adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang;
- b) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sanggau;
- c) Sebelah Barat dengan Kabupaten Mempawah;
- d) Sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau.

/ 2) Luas .....

## 2) Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Landak sebesar 9.909,10 Km<sup>2</sup> atau sekitar **6,75** persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dari total luas wilayah tersebut sebesar 8.522,35 Km<sup>2</sup> merupakan daerah tidak tergenang, sedangkan sisanya sebesar 1.386,75 Km<sup>2</sup> merupakan daerah tergenang. Dilihat dari letak Geografis Kecamatan Sengah Temila merupakan Kecamatan paling luas wilayahnya yaitu sebesar 1.963 Km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Air Besar sebesar 1.361,20 Km<sup>2</sup> serta Kecamatan Ngabang sebesar 1.148 Km<sup>2</sup>. adapun Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Sompak (yang merupakan pecahan dari Kecamatan Mompawah Hulu) dengan luas wilayah sebesar 219,76 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Landak termasuk dalam wilayah dataran rendah Pegunungan Barat, bagian Utara berbukit-bukit, ke selatan merupakan daerah lembah atau dataran yang memudahkan melakukan kegiatan sosial ekonomi. Dua Sub wilayah yang termasuk dalam dataran rendah pegunungan Barat yakni Sub Wilayah Pegunungan Niut ( $\pm 800$  Km<sup>2</sup>), yang meliputi Kecamatan Air Besar sebelah Utara dan Sub Wilayah Pegunungan Bawang ( $\pm 770$  Km<sup>2</sup>) meliputi wilayah Kecamatan Mompawah Hulu dan Kecamatan Menyuke. Jarak ibu Kota kabupaten menuju ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Landak bervariasi dengan Jarak terdekat 20 Km (Kec. Jelimpo) dan jarak terjauh 171 Km (Kec. Sompak)

Tabel 2. Data Luas wilayah, persentase Luas Kabupaten dan jarak tempuh/Km di Kabupaten Landak

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Luas Kabupaten	Jarak tempuh/Km
1	2	3	5	
1	Ngabang	1.148,10 Km <sup>2</sup>	11,59	-
2	Jelimpo	848,80 Km <sup>2</sup>	8,57	20 Km
3	Sengah Temila	1.963,00 Km <sup>2</sup>	19,81	43 Km
4	Sebangki	885,60 Km <sup>2</sup>	8,94	85 Km
5	Mandor	455,10 Km <sup>2</sup>	4,59	104 Km
6	Menjalin	322,90 Km <sup>2</sup>	3,26	107 Km
7	Mompawah Hulu	496,30 Km <sup>2</sup>	5,01	153 Km



8	Sompak	219,80 Km <sup>2</sup>	2,22	171 Km
9	Banyuke Hulu	273,80 Km <sup>2</sup>	2,76	74 Km
10	Menyuke	594,20 Km <sup>2</sup>	6	54 Km
11	Meranti	372,30 Km <sup>2</sup>	3,76	64 Km
12	Kuala Behe	968,00 Km <sup>2</sup>	9,77	43 Km
13	Air Besar	1.361,20 Km <sup>2</sup>	13,74	54 Km
<b>Jumlah</b>		<b>9.909,10 Km<sup>2</sup></b>	<b>100</b>	

Tabel 2. Banyaknya Kelurahan/Desa dan Dusun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Dusun
1	2	3	5
1	Ngabang	19	97
2	Jelimpo	13	54
3	Sengah Temila	14	95
4	Sebangki	5	27
5	Mandor	17	58
6	Menjalin	8	42
7	Mempawah Hulu	17	77
8	Sompak	7	23
9	Banyuke Hulu	7	38
10	Menyuke	16	86
11	Meranti	6	37
12	Kuala Behe	11	31
13	Air Besar	16	48
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>713</b>

### 3) Perbatasan

Wilayah Kabupaten Landak **tidak berbatasan** langsung dengan Negara Malaysia namun jalur Lalulintas dapat dilalui oleh Kendaraan dari 2 (Dua) Negara Tetangga yakni Brunei Darusalam dan Negara Malaysia melalui jalur darat dari perbatasan Entikong menuju kecamatan sosok Kabupaten Sanggau hingga menuju arah Pontianak. Sedangkan untuk perbatasan Jagoi Babang masuk melalui Kabupaten Bengkayang menuju arah kecamatan mempawah hulu menuju Pontianak dan melalui kecamatan banyuke Hulu Kabupaten Landak hingga menuju Pontianak, Hal ini Kabupaten Landak sebagai jalur lalulintas darat yang dimungkinkan akan mengakibatkan terjadinya kejahatan Transnasional.

/ 4) Jalan .....

#### 4) Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas penduduk dan kegiatan perekonomian antar daerah dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu jalan memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktifitas ekonomi dan lain sebagainya dilihat dari:

- a) panjang jalan menurut jenis permukaan dan status jalan di Kabupaten Landak (Km) Tahun 2017-2019 tercatat sepanjang **982,42 Km**. dilihat dari Panjang jalan menurut jenis permukaan dan menurut kondisi jalan, terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8.1.2**  
**Table**

**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Landak (km), 2017–2019**  
**Length of Roads by Type of Road Surface in Landak Regency (km), 2017–2019**

Jenis Permukaan Jalan Type of Road Surface	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/Paved	506,73	509,39	531,58
Kerikil/Gravel	148,88	148,63	93,95
Tanah/Soil	326,81	317,66	354,99
Lainnya/Others	-	6,73	1,90
<b>Jumlah/Total</b>	<b>982,42</b>	<b>982,42</b>	<b>982,42</b>

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak

**Tabel 8.1.3**  
**Table**

**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Landak (km), 2017–2019**  
**Length of Roads by Condition of Roads in Landak Regency (km), 2017–2019**

Kondisi Jalan Condition of Roads	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/Good	331,71	354,75	209,20
Sedang/Moderate	258,15	227,79	334,84
Rusak/Damage	288,26	285,46	341,14
Rusak Berat/Severely Damage	104,30	114,42	97,24
<b>Jumlah/Total</b>	<b>982,42</b>	<b>982,42</b>	<b>982,42</b>

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak

- b) Jumlah jembatan menurut Kondisi Jembatan dan menurut jenis konstruksi di Kabupaten Landak tahun 2018-2019, sebagai berikut:

**Tabel 8.1.4** Jumlah Jembatan menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Landak, 2018-2019  
**Table** *Number of Bridges by Type of Construction in Landak Regency, 2018- 2019*

Kondisi Jembatan Condition of Bridges	Status Jembatan / Status of Bridges			
	Desa/Village		Kabupaten/Regency	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik/Good	-	9,00	34,00	43,00
Sedang/Moderate	65,00	65,00	183,00	183,00
Rusak/Damage	219,00	217,00	289,00	283,00
Rusak Berat/Severely Damage	57,00	50,00	31,00	28,00
<b>Jumlah/Total</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak

**Tabel 8.1.5** Jumlah Jembatan menurut Jenis Kontruksi di Kabupaten Landak, 2018- 2019  
**Table** *Number of Bridges by Type of Construction in Landak Regency, 2018- 2019*

Kondisi Jembatan Condition of Bridges	Status Jembatan / Status of Bridges			
	Desa/Village		Kabupaten/Regency	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baja / Steel	-	4,00	15,00	17,00
Beton / Concrete	55,00	57,00	322,00	324,00
Kayu / Wood	274,00	268,00	190,00	186,00
Gantung / Suspension	12,00	12,00	10,00	10,00
<b>Jumlah/Total</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak

/ 5) Iklim .....

5) Iklim

a) Curah Hujan

Faktor yang merupakan ciri umum bagi suatu daerah rendah tropis adalah suhu udara yang relatif panas atau tinggi, sedangkan khusus daerah Kabupaten Landak suhu yang tinggi di ikuti pula dengan kelembaban udara yang tinggi. Secara umum curah hujan rata-rata bulanan di Tahun 2019 sebesar 402 mm, yang berarti terjadi peningkatan curah hujan dibanding tahun sebelumnya (curah hujan rata-rata bulanan tahun 2018 sebesar 319.1 mm). Intensitas curah hujan yang tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh daerahnya yang berhutan tropis. Rata-rata curah hujan tertinggi tahun 2019 terjadi pada bulan oktober yang mencapai 561 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari.

b) Udara dan Angin

Temperatur udara rata-rata selama tahun 2019 di Kabupaten Landak adalah 26,50°C. temperatur udara minimum terjadi pada bulan januari sampai dengan bulan Desember mencapai 22,50°C, sedangkan temperatur udara maksimum terjadi pada bulan April yang mencapai 35,60°C. dengan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 83 persen sampai 87 persen. Tingkat kelembaban udara yang paling tinggi terjadi pada bulan Oktober dan tingkat kelembaban yang paling rendah terjadi pada bulan Maret, april, Mei hingga September.

**b. Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam di wilayah Kabupaten Landak merupakan salah satu modal dasar pembangunan Nasional, namun hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat dari sistem pengelolaan dan eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya investor. Sumber Daya Alam tersebut meliputi:

### 1) Pertanian

Pertanian menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi di Kabupaten Landak. Pada tahun 2019, sebesar 81,04 ribu Ton gabah kering giling (GKG) turun 1,17 ribu Ton dibanding Tahun 2018, penurunan produksi Padi di kabupaten Landak terutama disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan pada Tahun 2019. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor pertanian, salah satunya dengan program Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Program ini merupakan sistem usaha tani yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Keberhasilan program-program tersebut dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019.

Secara keseluruhan produksi padi meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu saja tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dalam memajukan sektor pertanian. Selama tahun 2019 terdapat 146 Gabungan Kelompok tani dan ada 2.211 kelompok tani yang terdaftar.

Tabel 4. Banyaknya Gapoktan dan Jumlah kelompok tani di Kabupaten Landak Tahun 2018

**Tabel 5.3.1** Banyaknya Gapoktan dan Kelompok Tani di Kabupaten Landak, 2019  
**Table** Number of Combined Farmers Group and Farmer Group in Landak Regency, 2019

Kecamatan Subdistrict	Gapoktan Combined Farmers Group	Kelompok Tani Farmer Group
(1)	(2)	(3)
1. Sebangki	5	106
2. Ngabang	17	241
3. Jelimpo	8	148
4. Sengah Temila	21	271
5. Mandor	12	217
6. Menjalin	13	127
7. Mempawah Hulu	17	298
8. Sompak	9	134
9. Menyuke	14	249
10. Banyuke Hulu	8	81
11. Meranti	6	106
12. Kuala Behe	9	93
13. Air Besar	7	140
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>146</b>	<b>2 211</b>
<b>2018</b>	<b>146</b>	<b>2 152</b>
<b>2017</b>	<b>109</b>	<b>1 703</b>

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kab Landak/ Agriculture, Fishery and Food Security Agency of Landak Regency

Tabel 5. Luas Panen dan Produksi Padi menurut Bulan (ha) kecamatan di Kabuapten Landak Tahun 2019.

**Tabel 5.1.1 Luas Panen dan Produksi Padi<sup>1</sup> Menurut Bulan (ha), 2019**  
**Table 5.1.1 Harvested Area and Production of Paddy by Months(ha), 2019**

Bulan Months	Luas Panen (ha) Harvested Area (ha)	Produksi Padi (ton GKG) Paddy Production (ton GKG)
(1)	(2)	(3)
Januari/January	868	2 853
Februari/February	2 891	9 421
Maret/March	6 519	21 313
April/April	1 583	5 203
Mei/May	486	1 711
Juni/June	286	1 029
Juli/July	123	433
Agustus/August	1 038	3 705
September/September	5 180	19 928
Oktober/October	1 815	6 916
November/November	1 300	4 911
Desember/December	958	3 619
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>23 047</b>	<b>81 042</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Kualitas produksi gabah kering giling/The production is in term of dry unhusked paddy  
 Sumber/Source: BPS, Kerangka Sampel Area Padi/BPS, Sample Area Estimation of paddy

**Tabel 5.1.2 Produksi Padi<sup>1</sup> dan Beras Menurut Bulan (ton), 2019**  
**Table 5.1.2 Paddy and Rice Production<sup>1</sup> by Months (ton), 2019**

Bulan Months	Produksi Padi (ton GKG) Paddy Production (ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (ton) Rice Equivalent Production (ton)
(1)	(2)	(3)
Januari/January	2 853	1 679
Februari/February	9 421	5 545
Maret/March	21 313	12 544
April/April	5 203	3 062
Mei/May	1 711	1 007
Juni/June	1 029	606
Juli/July	433	255
Agustus/August	3 705	2 180
September/September	19 928	11 729
Oktober/October	6 916	4 070
November/November	4 911	2 890
Desember/December	3 619	2 130
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>81 042</b>	<b>47 697</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Kualitas produksi gabah kering giling/The production is in term of dry unhusked paddy  
 Sumber/Source: BPS, Kerangka Sampel Area Padi/BPS, Sample Area Estimation of paddy

/ 2) Perkebunan .....

2) Perkebunan

- a) Tanaman perkebunan yang terdapat di Kabupaten Landak utamanya terdiri dari karet, kopi, Kemiri, Kakao dan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan di Kabupaten Landak dimana luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak mencapai 124.269 (ha) yang perkebunan terbesarnya berada di Kecamatan Ngabang sebesar (53.012) Hektar. Untuk komoditas lainnya perkebunan di Kabupaten Landak yaitu Karet, dengan luas Areal perkebunan Karet sebesar 74.826 hektar dengan jumlah produksi 38.019 Ton.

Tabel 6. Luas Areal tanaman Perkebunan di Kabupaten Landak

5.3 PERKEBUNAN  
 ESTATE CROPS

**Tabel 5.3.1** Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha), 2018 dan 2019  
*Planted Area of Estate Crops by Subdistrict and Type of Crops (ha), 2018 dan 2019*

Kecamatan Subdistrict (1)	Kelapa Sawit/Oil Palm		Kemiri/Hazelnut	
	2018 (2)	2019 (3)	2018 (4)	2019 (5)
1. Sebangki	11 894	10 734	-	-
2. Ngabang	43 155	53 012	7	7
3. Jelimpo	3 001	3 270	-	-
4. Sengah Temila	8 885	9 560	34	34
5. Mandor	12 442	5 793	-	-
6. Menjalin	5 301	4 602	-	-
7. Mempawah Hulu	6 673	5 917	46	46
8. Sompak	281	142	-	-
9. Menyuke	8 217	6 590	22	22
10. Banyuke Hulu	482	506	-	-
11. Meranti	652	780	6	6
12. Kuala Behe	7 780	9 518	6	6
13. Air Besar	13 845	13 845	15	15
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>122 608</b>	<b>124 269</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.1

Kecamatan Subdistrict (1)	Karet/Rubber		Kopi/Coffee	
	2018 (6)	2019 (7)	2018 (8)	2019 (9)
1. Sebangki	2 499	2 499	37	37
2. Ngabang	6 194	6 172	12	12
3. Jelimpo	3 941	3 941	13	13
4. Sengah Temila	13 024	12 999	65	66
5. Mandor	8 626	8 603	7	7
6. Menjalin	5 298	5 298	55	59
7. Mempawah Hulu	2 758	2 758	36	36
8. Sompak	1 158	1 158	13	13
9. Menyuke	4 035	4 035	30	30
10. Banyuke Hulu	2 738	2 738	15	15
11. Meranti	2 133	2 133	20	20
12. Kuala Behe	2 190	2 190	8	8
13. Air Besar	20 302	20 302	556	566
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>74 896</b>	<b>74 826</b>	<b>867</b>	<b>882</b>

Tabel 7. Luas area Tanaman Kakao menurut Kecamatan dan Komposisi tanaman (Ha) di Kabupaten Landak Tahun 2019

Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.1

Kecamatan Subdistrict	Kakao/Cocoa		Jumlah/Total	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Sebangki	104	104	14 534	13 374
2. Ngabang	153	153	49 521	59 356
3. Jelimpo	114	114	7 069	7 338
4. Sengah Temila	113	113	22 121	22 772
5. Mandor	2	21	21 077	14 424
6. Menjalin	61	188	10 715	10 147
7. Mempawah Hulu	27	71	9 540	8 828
8. Sompak	5	13	1 457	1 326
9. Menyuke	3	52	12 307	10 729
10. Banyuke Hulu	19	127	3 254	3 386
11. Meranti	3	36	2 814	2 975
12. Kuala Behe	3	69	9 987	11 791
13. Air Besar	85	224	34 803	34 952
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>692</b>	<b>1 285</b>	<b>199 199</b>	<b>201 398</b>

Sumber/Source: Dinas Perkebunan Kabupaten Landak/Plantation Agency of Landak Regency

Tabel 8. Produksi tanaman perkebunan menurut Kecamatan dan jenis tanaman (Ton) Tahun 2019

**Tabel 5.3.2** **Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton), 2018 dan 2019**  
**Production of Estate by Subdistrict and Type of Crops (ton), 2018 and 2019**

Kecamatan Subdistrict	Kelapa Sawit/Oil Palm		Kemiri/Hazelnut	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sebangki	14 229	24 229	-	-
2. Ngabang	65 103	55 308	1	1
3. Jelimpo	3 302	13 932	-	-
4. Sengah Temila	12 620	17 663	7	5
5. Mandor	4 245	12 257	-	-
6. Menjalin	425	681	-	-
7. Mempawah Hulu	4 421	15 694	9	5
8. Sompak	150	321	-	-
9. Menyuke	9 519	23 119	2	2
10. Banyuke Hulu	357	373	-	-
11. Meranti	98	717	1	1
12. Kuala Behe	18 503	27 131	1	1
13. Air Besar	19 700	22 510	3	3
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>152 672</b>	<b>213 935</b>	<b>24</b>	<b>18</b>



Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.2

Kecamatan Subdistrict	Karet/Rubber		Kopi/Coffee	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Sebangki	623	632	12	12
2. Ngabang	2 851	2 761	3	3
3. Jelimpo	7 562	1 562	1	1
4. Sengah Temila	7 015	7 105	27	19
5. Mandor	4 450	4 550	2	2
6. Menjalin	3 025	3 025	21	14
7. Mempawah Hulu	1 020	1 020	13	13
8. Sompak	261	261	3	3
9. Menyuke	2 217	2 217	11	7
10. Banyuke Hulu	1 132	1 132	4	4
11. Meranti	425	425	6	6
12. Kuala Behe	6 140	6 140	2	2
13. Air Besar	7 189	7 189	125	99
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>43 910</b>	<b>38 019</b>	<b>230</b>	<b>185</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.2

Kecamatan Subdistrict	Kakao/Cocoa		Jumlah/Total	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Sebangki	15	15	14 879	24 888
2. Ngabang	22	22	67 980	58 095
3. Jelimpo	1	1	10 866	15 496
4. Sengah Temila	24	24	19 693	24 816
5. Mandor	2	2	8 699	16 811
6. Menjalin	61	58	3 532	3 778
7. Mempawah Hulu	27	25	5 490	16 757
8. Sompak	5	4	419	589
9. Menyuke	3	22	11 752	25 367
10. Banyuke Hulu	19	18	1 512	1 527
11. Meranti	3	3	533	1 152
12. Kuala Behe	3	15	24 649	33 289
13. Air Besar	85	80	27 102	29 881
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>270</b>	<b>289</b>	<b>197 106</b>	<b>252 446</b>

Sumber/Source: Dinas Perkebunan Kabupaten Landak/Plantation Agency of Landak Regency

/ Dari .....

- b) Banyaknya penerbitan Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Landak

**Tabel 11.3**  
**Table**

**Banyaknya Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB)**  
**Number of Publishing Company Registration/Business Identification Number (BIN) by District, 2019**

Kecamatan Subdistrict	PT	KOP	CV	FA	PP	Lainnya/ Others	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sebangki	-	-	-	-	1	2	3
2. Ngabang	29	12	80	-	-	221	342
3. Jelimpo	-	-	1	-	-	1	2
4. Sengah Temila	5	1	8	-	-	12	26
5. Mandor	-	-	3	-	-	8	11
6. Menjalin	1	-	-	-	-	1	2
7. Mempawah Hulu	1	-	2	-	-	5	8
8. Sompak	-	-	1	-	-	1	2
9. Menyuke	2	-	5	-	-	10	17
10. Banyuke Hulu	-	-	-	-	-	1	1
11. Meranti	-	-	-	-	-	2	2
12. Kuala Behe	3	-	-	-	-	1	4
13. Air Besar	-	-	-	-	-	2	2
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>267</b>	<b>422</b>

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak

- c) Data Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat Tahun 2019.

NO.	NAMA PERUSAHAAN	IUP				KOMODITI	KECAMATAN	KET
		AWAL		REVISI/PERUBAHAN				
		Nomor/ Tanggal	Luas (Ha)	Nomor/ Tanggal	Luas (Ha)			
1	2	3	4	5	6	11	12	13
1	PT. PTPN XIII Jl. Sultan Abdurrahman 11 pontianak	503/157/HK- 2014 tgl 24 April 2014	4,654.64		4,654.64	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
2	PT. CEMARU LESTARI Jl. Adisucipto Km. 8 Sei Raya Telp. (0561)721688 Fax. (0561)721651	KB.320/31/Me ntan/VI/90 Tgl. 02/06/1990	11,500		11,500	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
3	PT. KEBUN ARIA Jl. Pak Kasih Gg. Merak III B No. I Pontianak (Jl. Raya Ngb-Sgu Ds. P. Bendu Ngabang)	22 Tahun 2007 Tgl. 31/01/2007	16,500	503/008/DPM PTSPTK- PT/2017 Tgl. 26/09/ 2017	6,439	Kelapa Sawit	Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe dan Menyuke	Tidak Aktif
4	PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Jln. Parit Haji Hussin 2, Kompleks Alex griya 3 No F 41 Pontianak	525/241.B/Hk- 2011 Tgl. 23 /12/2011	16,559.76	503/007/DPM PTSPTK- PT/2017 Tgl. 26 /09/ 2017	13,963	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif

5	PT. PUTRA INDOTROPICAL Jl. MT.Haryono No.23 A Pontianak	525/261/ HK- 2009 Tgl. 10/12/2009	7,892	503/001/ HK- 2017 Tgl. 25/08/ 2017	3,640	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
6	PT. INDORESIN PUTRA MANDIRI Jl. MT.Haryono No.23 A Pontianak	525/112.a / HK-2009 Tgl. 01/07/2009	8,441	503/002/ HK- 2017 Tgl. 25/08/ 2017	2,300	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
7	PT. PRATAMA PROSENTINDO Jl.MT.Haryono No.23A Pontianak	525/112.d/ HK- 2009 Tgl. 01/07/2009	8,543	503/005/ HK- 2017 Tgl. 25/08/ 2017	1,257	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
8	PT. AGRONUSA INVESTAMA Jl.MT.Haryono No.23 A Pontianak	525/112.b/ HK- 2009 Tgl. 01/07/2009	5,246	503/004/ HK- 2017 Tgl. 25/08/2017	2,548	Kelapa Sawit	Sengah Temila & Sebangki	Aktif
9	PT. DAYA LANDAK PLANTATION Jl.MT.Haryono No.23 A Pontianak	525/112.c/ HK- 2009 Tgl. 01/07/2009	16,968	503/003/ HK- 2017 Tgl. 25/08/2017	2,321	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
10	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN Jl. MT.Haryono No.23A Ptk	525/77.A/HK- 2007 Tgl. 9 /04/2007	10,000		10,000	Kelapa Sawit	Air Besar, Meranti & Kuala Behe	Aktif
11	PT. LANDAK AGRO UTAMA Jl.Arteri Supadio Km 12 Pontianak 78391	2 Tahun 2006 Tgl. 03/01/2006	7,500	503/382/HK- 2016 Tgl. 02/08/ 2016	1,100	Kelapa Sawit	Menjalin & Mempawah Hulu	Aktif
12	PT. MUSTIKA ABADI KHATULISTIWA Jl.Parit H. Husin I Pontianak	525/20/HK- 2008 Tgl. 29/01/2008	18,000		18,000	Kelapa Sawit	Mandor, Menjalin & Sengah Temila	Aktif
13	PT. SATRIA MULTI SUKSES Jl.Parit H. Husin I Pontianak	525/12.A/HK- 2007 Tgl. 12/01/2007	9,000		9,000	Kelapa Sawit	Mandor, Sebangki & Sengah Temila	Aktif
14	PT. CHARINDO PALMA OETAMA Jl. Karya Kita Gg.Karya No.1 Ptk	40 Tahun 2006 Tgl. 16/05/2006	18,500		18,500	Kelapa Sawit	Air Besar & Kuala Behe	Tidak Aktif/P aillit
15	PT. AIRLANGGA SAWIT JAYA Jln.Karya Kita Gg.Karya No.1 Ptk	57 Tahun 2005 Tgl. 15/06/2005	17,000	503/381/HK -2016 Tgl. 2 Agustus 2016	7,807	Kelapa Sawit	Air Besar	Tidak Aktif/P aillit
16	PT. MALINDO PERSADA KHATULISTIWA Komplek MegaMall Blok G. No. 15 Jl. A. Yani Pontianak- Kalbar Telp. (0561) 765812, Fax (0561) 762256	167 Tahun 2006 Tgl. 18/12/2006	20,000	503 / 326.A/Hk- 2014 tgl 15 Desember 2014	10,533.64	Kelapa Sawit	Mempawah Hulu & Sompak	Aktif

17	PT. MAISKA BHUMI SEMESTA Komplek MegaMall Blok G. No. 15 Jl. A. Yani Pontianak- Kalbar Telp. (0561) 765812, Fax (0561) 762256	525 /207.B / HK-2010 Tgl. 07/09/2010	19,356		19,356	Kelapa Sawit	Mandor, Menjalin & Sompak	Aktif
18	PT. CONDONG GARUT Cimari,Pameung Peuk Garut Jabar Telp(0262) 5210004 Fax(0262)521746 dan Jkt:Jl.Wijaya I No.9A-B Kebayoran Baru (Jaksel) Telp(021)7287619,7267620, 7211210 Fax(021)7211202	525 /294 / HK-2010 Tgl. 29/12/2010	12,055	503/399/HK-2016 Tgl. 19 Agustus 2016	7,140.00	Kelapa Sawit	Mandor & Menjalin	Aktif
19	PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA Jl. KS Tubun No. 34 Pontianak Telp. 0561-760673 Fax. 760838	525/06/HK-2011 Tgl. 21/01/2011	11,797	503/007/DP MPTSPK-2018 Tgl. 23 September 2018	4,000	Kelapa Sawit	Mandor & Menjalin	Aktif
20	PT. HILTON DUTA LESTARI Jalan Karya Baru Pontianak	525/26/HK-2010 Tgl. 22/02/2010	19,973		19,973	Kelapa Sawit	Menjalin & Mempawah Hulu	Aktif
21	PT. CITRA NIAGA PERKASA Jl. Abdurrahman Saleh No. 16, Kel. Bangka Belitung, Pontianak Tenggara. Pontianak - Kalimantan Barat 78124	525/33/HK-2011 Tgl. 24/02/2011	13,527		13,527	Kelapa Sawit	Sebangki	Aktif
22	PT. TEMILA AGRO ABADI Jl. Abdurrahman Saleh No. 16, Kel. Bangka Belitung, Pontianak Tenggara. Pontianak - Kalimantan Barat 78124	525/7/HK-2009 Tgl. 12/01/2009	8,000		8,000	Kelapa Sawit	Sengah Temila & Sebangki	Aktif
23	PT.BORNEO MURIA PLANTATION Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/169/HK-2009 Tgl. 10/08/2009	13,566	503/002/ HK-2018 Tgl. 18/01/2018	8,199	Kelapa Sawit	Air Besar & Kuala Behe	Aktif
24	PT.PALMA MEGA MULIA Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/168/HK-2009 Tgl. 10/08/2009	12,580	503/001/ HK-2018 Tgl. 18/01/2018	8,862	Kelapa Sawit	Jelimpo, Kuala Behe & Ngabang	Aktif
25	PT. PALMA ASRI SEJAHTERA Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	503/303/HK-2015 tgl 18 Juni 2015	15,222	503/005/ HK-2018 Tgl. 24/01/2018	5,530	Kelapa Sawit	Ngabang & Menyuke	Aktif

26	PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	503/327/HK-2014 Tgl. 16 Desember 2014	12,919	503/006/HK-2018 Tgl. 24/01/2018	12,842	Kelapa Sawit	Ngabang & Kuala Behe	Aktif
27	PT. DAYA SUMBER MAKMUR Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/165/HK-2009 Tgl. 10/08/2009	14,088	503/006/DP MPTSPTK-PT/2017 Tgl. 26/09/2017	4,577	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
28	PT.BAMBOE JAYA PLANTATION Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/ 201 / HK-2010 Tgl. 25/08/2010	9,364		9,364	Kelapa Sawit	Kuala Behe dan Air Besar	Aktif
29	PT. LINGKAR INDAH PLANTATION Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	503/302/HK-2015 tgl 18 Juni 2015	7,904	503/004/HK-2018 Tgl. 24/01/2018	5,341	Kelapa Sawit	Ngabang & Jelimpo	Aktif
30	PT. GEMILANG SAWIT KENCANA Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/ 289 / HK-2012 Tgl. 21/12/2012	12,146	503/304/HK-2015 tgl 8 Juni 2015	8,457	Kelapa Sawit	Sengah Temila & Sebangki	Aktif
31	PT. GAPURA ALAS MAKMUR Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/12/HK-2009 Tgl. 28/01/2009	10,500		10,500	Kelapa Sawit	Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe, Menyuke & Meranti	Aktif
32	PT. SABAN SAWIT SUBUR Jl.Arteri Supadio Km 12,5 Pontianak 78391	525/0041.1/14 .A/HK/07 Tgl. 15/01/2007	8,000		8,000	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
33	PT. AGRINA INDAH Jl. Budikarya No. 1 Pontianak	525 /295 / HK-2010 Tgl. 29/12/2010	591.58		591.58	Kelapa Sawit	Mempawah Hulu	Aktif
34	PT. SARASWANTI AGRO ESTATE Jl. Purnama, Town Square Bulding Pontianak	503/311/HK-2014 Tgl. 3 Desember 2014	2,185.44		2,185.44	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
35	PT. KUSUMA MENTARI MAKMUR Jl. Sultan Abdurrahman No. 68 Pontianak	503/324/HK-2014 Tgl. 15 Desember 2014	4,403		4,403	Kelapa Sawit	Kuala Behe dan Air Besar	Aktif
36	PT. PERTIWI AGRO SEJAHTERA Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930 Telp. 021-5770886, 5771711 Fax. 021-5770015, 5771712	503/326/HK-2014 Tgl. 15 Desember 2014	5,048		5,048	Kelapa Sawit	Kuala Behe	Aktif

37	PT. NUSANTARA SARANA ALAM Sapta Mulia Center Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B.Kl. Pulogadung-Jakarta 13930 Telp. 021-4618135 Fax : 021-4606942	503/282/HK-2015 tgl 8 Juni 2015	12,102		12,102	Kelapa Sawit	Menyuke, Meranti & Banyuke Hulu	Aktif
38	PT. AGRO PLANINDO UTAMA Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 003/004 Setia Budi, Jakarta Selatan 12930 Telp. 021-5771711 Fax. 021-5771712	503/325/HK-2014 Tgl. 15 Desember 2014	3,633		3,633	Kelapa Sawit	Kuala Behe & Air Besar	Aktif
39	PT. TEBAR TANDAN TENERAH Gg. Ketapang Dalam RT/RW. 005/012 Pontianak	525/0107.A/H k-2010 Tgl. 7 Mei 2010	15,046		15,046	Kelapa Sawit	Menyuke, Banyuke Hulu, Meranti dan Mph Hulu	Aktif
40	PT. SURYA JAYA SELARAS Jl. Griya Utama Blok A No. 27, Kel. Sunter Agung, Jakarta Utara	525/ 206 / HK-2009 Tgl. 30/09/2009	6,392		6,392	Kelapa Sawit	Mempawah Hulu, Menjalin dan Mandor	Tidak Aktif
41	PT. RIMBA BORNEO MAKMUR Jln. Purnama Nomor 56 Pontianak	525/175/HK-2009 Tgl. 20/08/2009	5,602		5,602	Kelapa Sawit	Sengah Temila & Ngabang	Aktif
42	PT. BERSATU KITA MAKMUR Jl. Dr. Wahidin Rt/Rw 001/31 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	503/233/HK-2014 tgl. 18 Agustus 2014	7,125		7,125	Kelapa Sawit	Ngabang dan Sengah Temila	Tidak Aktif
43	PT. KEMBAYAN SUBUR AGRO	525/15.A/HK-2007 Tgl. 18/01/2007	5,000		5,000	Kelapa Sawit	Kuala Behe	Tidak Aktif
44	PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS Jl. Adi Sucipto Pontianak	HK/350/E6.22 3/I.86	5,000		5,000	Kelapa Sawit	Ngabang	Tidak Aktif
45	PT. LANDAK SUBUR PLANTATION Gedung Jamkrindo Lt. 6 Ruang 603 Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. Kemayoran Jak-Pus	503/228/HK-2017 Tgl. 3 Juli 2017	1,930	503/01/DPM PTSP & NAKER/2019 Tgl. Mei 2019	1,900	Kelapa Sawit	Menjalin dan Mandor	Aktif
46	PT. BORNEO KHATULISTIWA PRATAMA Komplek Perdana Blok E No. 10 Pontianak	503/512/HK-2015 Tanggal 11 Desember 2015	3,463	503/187/HK-2019 Tgl. 13 Mei 2019	4,142.16	Kelapa Sawit	Air Besar	Aktif

47	PT. RIMBA SAWIT LESTARI Komplek Ruko Multiguna Bloka A No. 1 jln. Arteri Supadio (A. Yani 2), Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov Kalbar 78391	503/368/HK-2016 Tgl. 26 Juli 2016	1,023		1,023	Kelapa Sawit	Jelimpo	Aktif
48	PT. MULTI PERKASA SEJAHTERA Jl. Sertu Tebedak Km. 7, Kec. Ngabang	503/240/HK-2016 Tanggal 20/04/ 2016	100		100	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
49	PT. GUNUNG ABADI SENTOSA /GUNUNG PERSADA SEJAHTERA Jl. KS Tubun No. 34 Pontianak Telp. 0561-760673 Fax. 760838	503/ 237 /HK-2017 Tanggal 12/07/ 2017	1,561		1,561	Kelapa Sawit	Mandor	Aktif
50	PT. GUNUNG TIANG TANJUNG SEJAHTERA Jl. KS Tubun No. 34 Pontianak Telp. 0561-760673 Fax. 760838	503/310/HK-2017 Tanggal 19/10/ 2017	930		930	Kelapa Sawit	Ngabang	Aktif
<b>JUMLAH</b>			<b>478,436.42</b>		<b>359,015.46</b>			

### 3) Peternakan

- a) Populasi Ternak di Kabupaten Landak terbagi dalam Dua populasi Besar dan Kecil, untuk Populasi Besar terdiri dari sapi dan Kerbau sedangkan populasi kecil adalah Kambing dan babi. Untuk jumlah populasi Sapi tahun 2019 tercatat 8.071 ekor, sedangkan Kerbau Nihil. Sedangkan pada populasi ternak kecil pada Kambing tercatat 7.113 ekor dan Babi tercatat sebanyak 118.793 ekor.
- b) Populasi ternak Unggas menurut jenisnya (Ekor) tahun 2019 tercatat pada Ayam Buras sebanyak 201.909 ekor, Ayam Ras (potong) sebanyak 1.941.000 ekor, sedangkan Itik sebanyak 11.086 ekor. Jika dilihat dari data pada Tabel dibawah menunjukan bahwa Populasi ternak Unggas terbanyak berada di Kecamatan Ngabang dengan jumlah populasi sebanyak 1.251.374 ekor. Disusul oleh Kecamatan Sengah Temila dengan populasi ternak sebanyak 361.503 Ekor.

/ Tabel .....

Tabel 10. Populasi ternak besar dan Kecil di Kabupaten Landak Tahun 2019

**Tabel 5.3.2**  
**Table**

**Populasi Ternak Besar dan Kecil Menurut Jenisnya (Ekor), 2019**

**Large and Small Livestock Population by Type, 2019**

Kecamatan Subdistrict	Ternak Besar Large Livestock		Ternak Kecil Small Livestock		Jumlah Total	
	Sapi Cow	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Babi Pig		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Sebangki	328	-	198	5 493	6 019	
2. Ngabang	1 038	-	576	22 975	24 589	
3. Jelimpo	213	-	135	2 495	2 843	
4. Sengah Temila	1 058	-	812	13 358	15 228	
5. Mandor	874	-	579	13 093	14 546	
6. Menjalin	1 014	-	1 005	8 992	11 011	
7. Mempawah Hulu	1 061	-	2 109	18 231	21 401	
8. Sompak	460	-	509	4 403	5 372	
9. Menyuke	1 235	-	634	13 127	14 996	
10. Banyuke Hulu	222	-	214	4 005	4 441	
11. Meranti	90	-	44	4 696	4 830	
12. Kuala Behe	276	-	198	3 257	3 731	
13. Air Besar	202	-	100	4 668	4 970	
Kabupaten Landak	2019	8 071	-	7 113	118 793	133 977
	2018	8 739	-	7 194	111 128	127 061
	2017	8 484	-	7 053	108 948	124 485

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kab Landak/ Agriculture, Fishery and Food Security Agency of Landak Regency

**Tabel 5.3.3**  
**Table**

**Populasi Ternak Unggas Menurut Jenisnya (Ekor), 2019**

**Poultry Population by Type , 2019**

Kecamatan Subdistrict	Ayam Buras Country Fowl	Ayam Ras Potong Broiler	Ayam Ras Petelur Hens	Itik Duck	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Sebangki	9 321	-	-	166	9 487	
2. Ngabang	51 112	1 200 000	-	262	1 251 374	
3. Jelimpo	11 280	6 000	-	492	17 772	
4. Sengah Temila	8 220	350 000	-	3 283	361 503	
5. Mandor	14 900	240 000	-	500	255 400	
6. Menjalin	11 285	15 000	-	986	27 271	
7. Mempawah Hulu	33 928	80 000	-	1 009	114 937	
8. Sompak	13 876	-	-	559	14 435	
9. Menyuke	8 021	25 000	-	1 149	34 170	
10. Banyuke Hulu	17 438	-	-	825	18 263	
11. Meranti	5 034	-	-	413	5 447	
12. Kuala Behe	12 107	5 000	-	739	17 846	
13. Air Besar	5 387	20 000	-	703	26 090	
Kabupaten Landak	2019	201 909	1 941 000	-	11 086	2 153 995
	2018	372 171	2 140 320	-	10 356	2 522 847
	2017	364 874	2 058 000	-	10 219	2 433 093

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kab Landak/ Agriculture, Fishery and Food Security Agency of Landak Regency



#### 4) Perikanan

Secara geografis, Kabupaten Landak memiliki potensi yang cukup baik di bidang perikanan, hal ini dapat dilihat dari adanya usaha budidaya perikanan air tawar, tambak dan laut yang dijadikan mata pecaharian penduduk di beberapa wilayah Kabupaten Landak. Usaha perikanan budidaya masih terbatas dan adanya ketidak seimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan. pengembangan budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanya permasalahan penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi yang kurang memadai. Hal tersebut diakibatkan kurangnya informasi yang dapat mengakibatkan pada jaringan pemasaran, terbatasnya akses permodalan, serta kurangnya penyuluhan perikanan dan sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal;

Tabel 11. Jumlah Produksi Perikanan darat menurut Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Landak Tahun 2019

**Tabel 5.3.9** **Produksi Perikanan Darat Menurut sub Sektor Perikanan di Kabupaten Landak (Ton), 2019**  
**Table** **Production of Inland Fisheries by Fisheries Subsector in Landak Regency (ton), 2019**

Kecamatan Subdistrict	Perairan Umum Open Water	Budidaya Perikanan / Culture Fishery			
		Mas Goldfish	Nila	Lele Catfish	Gurame
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sebangki	5,47	5,89	6,66	7,18	0,26
2. Ngabang	4,99	126,87	166,04	89,37	0,50
3. Jelimpo	-	12,82	19,08	4,44	0,08
4. Sengah Temila	5,68	41,77	70,76	16,32	2,50
5. Mandor	-	54,94	51,10	9,85	1,65
6. Menjalin	-	17,31	26,61	6,87	0,50
7. Mempawah Hulu	3,36	17,26	50,10	6,44	0,47
8. Sompak	-	8,53	13,67	7,11	-
9. Menyuke	-	12,48	13,55	5,48	0,14
10. Banyuke Hulu	-	11,62	18,13	7,66	0,33
11. Meranti	5,91	8,83	11,56	4,46	0,04
12. Kuala Behe	-	16,55	15,14	2,81	-
13. Air Besar	-	14,67	17,13	6,25	-
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>25,41</b>	<b>349,54</b>	<b>479,53</b>	<b>174,24</b>	<b>6,47</b>

/ Budidaya .....

Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.9

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Perikanan / Culture Fishery				Jumlah Total
	Patin	Ikan Lainnya	Mina Padi	Keramba Cage	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Sebangki	0,44	-	-	15,00	40,90
2. Ngabang	-	-	-	-	387,77
3. Jelimpo	0,15	0,05	-	-	36,62
4. Sengah Temila	-	0,05	5,00	-	142,08
5. Mandor	0,99	-	-	-	118,53
6. Menjalin	-	-	-	-	51,29
7. Mempawah Hulu	-	0,54	-	-	78,17
8. Sompak	-	-	-	-	29,31
9. Menyuke	-	-	-	-	31,65
10. Banyuke Hulu	-	-	-	-	37,74
11. Meranti	-	-	-	-	30,80
12. Kuala Behe	-	0,03	-	-	34,53
13. Air Besar	1,98	0,48	-	-	40,51
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>3,56</b>	<b>1,15</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 059,90</b>

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kab Landak/ Agriculture, Fishery and Food Security Agency of Landak Regency

Dijelaskan pada Tabel 11, tersebut diatas bahwa produksi perikanan di wilayah Kabupaten Landak terbanyak pada budidaya ikan Nila dibanding ikam Mas, jika dilihat dari tabel tersebut kolam merupakan budidaya yang baik dan dapat lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan Kerambak, hal tersebut dilihat dari tabel budidaya kolam Ikan Nila sebanyak 479,53 Ton sedangkan Ikan Mas sebanyak 349,54 Ton.

#### 5) Kehutanan

Wilayah Hutan di Kabupaten Landak termasuk dalam penggunaan tanah kering dengan total 248.439 Hektar, yang termasuk dalam Hutan Negara seluas 147.971 Hektar dan Hutan Rakyat seluas 100.568 Hektar.

/ Tabel .....

Tabel 12. Jenis Hutan menurut kepemilikan

No	Kecamatan	Jenis Hutan (Ha)		Jumlah (Ha)
		Rakyat	Negara	
1	2	3	4	5
1.	Sebangki	5.510	-	5.510
2.	Ngabang	20.950	18.191	39.141
3.	Jelimpo	8.867	8.062	16.929
4.	Sengah Temila	-	81.448	81.448
5.	Mandor	11.623	8.081	19.604
6.	Menjalin	250	-	250
7.	Mempawah Hulu	4.697	300	4.997
8.	Sompak	862	12.000	12.862
9.	Menyuke	12.049	5.020	17.069
10.	Banyuke Hulu	13.549	-	13.549
11.	Meranti	4.339	4.230	8.569
12.	Kuala Behe	17.341	10.022	27.363
13.	Air Besar	531	617	1.148
J U M L A H		100.568	147.971	248.439

Jenis hutan menurut pemanfaatan:

- Hutan produktif terdapat di Kecamatan Ngabang, Air Besar dan Kuala Behe;
- Hutan Non Produktif terdapat hampir disemua Kecamatan di Kabupaten Landak;
- Hutan Lindung terdapat di Kecamatan mandor, Ngabang, Air Besar dan Kuala Behe.

Tabel 13. Jenis hutan menurut Kawasan di Kabupaten Landak

NO	STATUS KAWASAN	LUAS (Ha)
1.	Kawasan Lindung	133.970
	a. Hutan Cagar Alam	3.567
	b. Hutan Taman Nasional	66.093
	c. Hutan Wisata	0
	d. Hutan Lindung	64.310
	e. Suaka Alam	0
2.	Kawasan Budidaya	204.324
	a. Hutan Produksi Terbatas	16.846
	b. Hutan Produksi Biasa	168.255
	c. Hutan Konversi	19.233
Jumlah		338.294

6) Pertambangan

Wilayah Kabupaten Landak dalam pengelolaan sumber bahan tambang masih bersifat perorangan atau kelompok tertentu dan masih menggunakan cara tradisional, didalam pengelolaannya belum ada yang memiliki Izin Pengelolaan bahan Tambang serta masih banyaknya pengelola yang kurang memperhatikan dampak Lingkungan baik berupa kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan, sehingga berdampak buruk bagi orang banyak dan lingkungan disekitar pertambangan.

Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian selama kurun waktu 2017-2019 cenderung fluktuatif, jika dilihat dari laju pertumbuhan berdasarkan harga konstan di tahun 2017 sebesar 3,59 persen, kemudian naik menjadi 4,02 persen di Tahun 2018 selanjutnya turun menjadi 3,82 persen di Tahun 2019, sedangkan untuk distribusi persentase atas dasar harga berlaku, Kabupaten Landak mengalami penurunan di tahun 2019 dimana untuk tahun 2017 sebesar 2,43 persen dan tahun 2018 sebesar 2,43 persen sedangkan Tahun 2019 sebesar 2,42 persen. Potensi bahan tambang yang banyak di Kabupaten Landak antara lain Emas, diperkirakan sebesar 18 juta Ton, Intan sebesar 2.040.285 karat, Andesit 400 Juta m<sup>3</sup>, Kaolin 3,85 m<sup>3</sup>, pasir kuarsa 3.009.500 m<sup>3</sup>, Bauksit sebesar 4.078.260 Wmt.

c. Demografi

1) Jumlah Penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada Tahun 2019, data penduduk Kabupaten Landak adalah sebanyak 401.147 jiwa yang terdiri dari 210.512 laki-laki dan 190.635 perempuan dengan sex ratio 110. Komposisi jumlah penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Landak tahun 2019 adalah sebagai berikut :

/ Tabel .....

Tabel 18. Jumlah Penduduk Kabupaten Landak Tahun 2019

**Tabel 3.1.2 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2019**  
**Table Population by District and Sex, 2019**

Kecamatan Subdistrict	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sebangki	10 027	9 321	19 348
2. Ngabang	39 977	37 013	76 990
3. Jelimpo	15 156	136 93	28 849
4. Sengah Temila	34 126	308 83	65 009
5. Mandor	17 560	16 455	34 015
6. Menjalin	11 616	10 652	22 268
7. Mempawah Hulu	21 417	18 925	40 342
8. Sompak	8 999	8 103	17 102
9. Menyuke	16 396	14 723	31 119
10. Banyuke Hulu	7 454	6 513	13 967
11. Meranti	5 547	4 879	10 426
12. Kuala Behe	8 900	7 892	16 792
13. Air Besar	13 337	11 583	24 920
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>210 512</b>	<b>190 635</b>	<b>401 147</b>
Hasil Registrasi/Registration Result	210 512	190 635	401 147
Hasil Proyeksi <sup>1</sup> /Projection Result <sup>2</sup>	196 343	180 962	377 305

Catatan/Note: <sup>1</sup>Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)/Data from the result of Indonesia Population Projection 2010–2035 (mid year/June)  
 Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak/Population and Civil Registration Agency of Landak Regency

Tabel 19. Data komposisi jenis kelamin penduduk per Kecamatan:

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RATIO
1	2	3	4	5	6
1	Ngabang	39.977	37.013	76.990	108
2	Jelimpo	15.156	13.693	28.849	111
3	Sengah Temila	34.126	30.883	65.009	111
4	Sebangki	10.027	9.321	19.348	108
5	Mandor	17.560	16.455	34.015	107
6	Menjalin	11.616	10.652	22.268	109
7	Mempawah Hulu	21.417	18.925	40.342	113
8	Sompak	8.999	8.103	17.102	111
9	Banyuke Hulu	7.454	6.513	13.967	114
10	Menyuke	16.396	14.723	31.119	111
11	Meranti	5.547	4.879	10.426	114
12	Kuala Behe	8.900	7.892	16.792	113
13	Air Besar	13.337	11.583	24.920	115
<b>Jumlah</b>		<b>210.512</b>	<b>190.635</b>	<b>401.147</b>	<b>110</b>

/ Tingkat .....

Tingkat kepadatan wilayah Kabupaten Landak sekitar 40 jiwa/ KM<sup>2</sup> bila diproyeksikan jumlah penduduk dengan luas wilayah 9.909,10 km<sup>2</sup>, Persebaran penduduk Kabupaten Landak tidak merata antar wilayah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun pedesaan dan pegunungan.

Tabel 20. Kepadatan penduduk dirinci perkecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan Km <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
1	Ngabang	1.148,10 Km <sup>2</sup>	76.990	67
2	Jelimpo	848,80 Km <sup>2</sup>	28.849	34
3	Sengah Temila	1.963,00 Km <sup>2</sup>	65.009	33
4	Sebangki	885,60 Km <sup>2</sup>	19.348	22
5	Mandor	455,10 Km <sup>2</sup>	34.015	75
6	Menjalin	322,90 Km <sup>2</sup>	22.268	69
7	Mempawah Hulu	496,34 Km <sup>2</sup>	40.342	81
8	Sompak	219,76 Km <sup>2</sup>	17.102	78
9	Banyuke Hulu	273,80 Km <sup>2</sup>	13.967	51
10	Menyuke	594,16 Km <sup>2</sup>	31.119	52
11	Meranti	372,34 Km <sup>2</sup>	10.426	28
12	Kuala Behe	968,00 Km <sup>2</sup>	16.792	17
13	Air Besar	1.361,20 Km <sup>2</sup>	24.920	18
Jumlah		9.909,10 Km <sup>2</sup>	401.147	40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak

## 2) Konsentrasi Penduduk

Wilayah Kabupaten Landak dihuni oleh bermacam-macam suku yang berdiam didaerah pedalaman, pegunungan maupun di ibukota/ Kecamatan/antara lain sebagai berikut:

- Suku Melayu, pada umumnya berdiam didaerah ibukota kecamatan/ Kabupaten;
- Suku Dayak, pada umumnya berdiam di daerah ibukota kecamatan /Kabupaten, pedalaman dan pegunungan;
- Suku China, pada umumnya berdiam di Ibukota Kecamatan/ Kabupaten;
- Suku Jawa, Madura, Bugis dan lain-lain pada umumnya diam di kota Kecamatan/Kabupaten dan daerah pemukiman transmigrasi;

3) Karakteristik Penduduk

Daerah Kabupaten Landak masih sangat rawan terhadap masalah SARA, yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang menyolok antara satu suku dengan suku lainnya:

- a) Suku Melayu tingkat kehidupan ekonominya cukup baik, mudah puas terhadap sesuatu yang dihasilkan, pada umumnya diam didaerah pantai dan ibukota Kecamatan / Kabupaten;
- b) Suku Dayak sangat kuat mempertahankan adat istiadatnya / hukum adat, tingkat kehidupan ekonomi masih lemah, cara bertani masih menggunakan alat tradisional, jujur dan memeluk solidaritas yang tinggi, bertemperamen tinggi dan emosional;
- c) Suku Bugis tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, ulet dalam bekerja, fanatis agama, bertemperamen keras, emosional namun dalam batas-batas tertentu dalam menghadapi masalah masih mau mengalah;
- d) Suku Madura tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, pola bertani cukup maju, serta mau bekerja keras, fanatis agama, bertemperamen keras dan pendendam serta emosional, tidak segan-segan melukai lawan;
- e) Suku China tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, ulet dalam bekerja, solidaritas sesama suku cukup tinggi terutama dalam bidang ekonomi, berdiam berkelompok-kelompok, dalam menghadapi masalah tertentu masih mau mengalah, pandai bergaul dan cepat menyesuaikan diri serta memiliki sifat pamrih dan asal selamat. Suku China Khek pada umumnya sebagai petani dan peladang serta nelayan tinggal di daerah Sambas, Kabupaten Mempawah, sedangkan suku China Hoklo pada umumnya sebagai pedagang dan tinggal di kota-kota Kecamatan/Kabupaten maupun Kodya Pontianak.

- f) Suku Jawa tingkat kehidupan ekonomi sebagian cukup baik, bekerja sebagai petani atau berjualan, untuk pola bertani cukup maju, serta mau bekerja keras dan sifat mengalah, tinggal di wilayah transmigrasi maupun di kota Kabupaten.

4) Komposisi Penduduk

- a) Komposisi berdasarkan presentase karakteristik penduduk, sebagai berikut:

- (1) Suku Dayak : 54,52 %
- (2) Suku Melayu : 27,77 %
- (3) Suku Cina : 0,57 %
- (4) Suku Bugis : 0,08 %
- (5) Suku Jawa : 15,93 %
- (6) Suku Madura: 0,12 %
- (7) Suku Sunda : 0,14 %
- (8) Suku Batak : 0,72 %
- (9) Suku Banjar : 0,01 %
- (10) Lain-lain : 0,14 %

- b) Prosentase pemeluk Agama / Kepercayaan masyarakat Kabupaten Landak:

- |     |                    |   |         |      |         |
|-----|--------------------|---|---------|------|---------|
| (1) | Islam              | : | 63.735  | Jiwa | 16,00 % |
| (2) | Protestan          | : | 117.605 | Jiwa | 29,52 % |
| (3) | Khatolik           | : | 214.473 | Jiwa | 53,84 % |
| (4) | Hindu              | : | 35      | Jiwa | 0,01 %  |
| (5) | Budha              | : | 2.345   | Jiwa | 0,59 %  |
| (6) | Khonghucu          | : | 135     | Jiwa | 0,03 %  |
| (7) | Aliran Kepercayaan | : | 8       | Jiwa | 0,01 %  |

/ c) Rasio .....



- c) Rasio Jumlah Personel Riil Polres Landak dengan jumlah penduduk Kabupaten Landak Tahun 2020.

Jumlah Rasio personel Riil Polres Landak sebanyak **442** Personel dengan Jumlah penduduk Kabupaten Landak sebanyak 401.147 Jiwa, dengan Rasio **1 : 907**, berdasarkan tabel data tersebut:

NO	KESATUAN	KECAMATAN	RIIL	KUAT BIN		KUAT OPS		JMLH PENDUDUK	RASIO DGN JMLH KUAT PERS	RASIO DGN OPS
				JMLH	%	JMLH	%			
1	POLRES		258	67	25.9	191	74.0		1 : 410	1 : 554
2	POLSEK NGABANG	NGABANG JELIMPO	37	6	16.2	31	83.7	105.839	1 : 2.860	1 : 3.414
4	POLSEK SENGHAH TEMILA	SENGHAH TEMILA	24	3	13,7	21	87.5	65.009	1 : 2.708	1 : 3.095
5	POLSEK SEBANGKI	SEBANGKI	13	3	21,5	12	92.3	19.348	1 : 1.488	1 : 1.612
6	POLSEK MANDOR	MANDOR	20	3	15	17	85.0	34.015	1 : 1.700	1 : 2.000
7	POLSEK MENJALIN	MENJALIN	17	3	25	14	82.3	22.268	1 : 1.309	1 : 1.590
8	POLSEK MEMPAWAH HULU	MEMPAWAH HULU SOMPAK	18	3	17.6	15	83.3	57.444	1 : 3.191	1 : 3.829
10	POLSEK MENYUKE	MENYUKE BANYUKE HULU	16	3	18,7	13	81.2	45.086	1 : 2.817	1 : 3.468
11	POLSEK MERANTI	MERANTI	12	3	25	9	75.0	10.426	1 : 868	1 : 1.158
12	POLSEK KUALA BEHE	KUALA BEHE	14	3	21.4	11	78.5	16.792	1 : 1.199	1 : 1.526
13	POLSEK AIR BESAR	AIR BESAR	13	3	23	10	76.9	24.920	1 : 1.916	1 : 2.492
JUMLAH			442	100	22.6	342	77.3	401.147	<b>1 : 907</b>	1 : 1.172

- d) Rasio Jumlah personel Riil Polres Landak dengan Luas wilayah Kabupaten Landak.

Rasio Jumlah personel Riil Polres Landak sebanyak **442** Personel dengan Jumlah Luas wilayah Kabupaten Landak seluas 9.909.10 Km<sup>2</sup> dengan Rasio **1 : 22,41 Km<sup>2</sup>**, berdasarkan tabel data tersebut:

/ e) Hasil .....

- e) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan Itwasda Polda Kalbar terhadap Satker Polres Landak Tahun 2018-2020, sebagai berikut:

TAHUN	NILAI	PERENCANAAN KINERJA	UKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI	KET
2018	78,26	25.07	19.17	10.9	8.94	14.19	BB	
2019	76,95	24.01	19.17	10.90	8.69	14.19	BB	

- f) Jumlah regulasi Kerjasama dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan Polres Landak dengan Instansi pemerintah sebanyak 7 (Tujuh) MoU, sebagai berikut:

NO	KESATUAN	NOTA KESEPAHAMAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	POLRES LANDAK	PT. Pertamina	Nomor: SPB-01/I/2018/Sarpras SPB-22/I/F16420/2018-S3 Tentang Penyediaan BBM dan Pelumas Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018
2.	POLRES LANDAK	PT. Bank Kalbar Cabang Ngabang	B/05/VII/2018 NGB/KC-UMM/102 tanggal 3 Juli 2018 s/d 3 Juli 2020
3.	POLRES LANDAK	PT. Bank BNI Kcp Ngabang	B/06/VII/2018 PNK/09/979/2018 tanggal 3 Juli 2018 s/d 3 Juli 2020
4.	POLRES LANDAK	PT. PLN (Persero) Cabang Ngabang	Surat perjanjian Nomor SP/06/I/2018 tanggal 21 Januari 2016
5.	POLRES LANDAK	PT. Telekomunikasi	Executive Vice President Telkom Regional VI Nomor: K. TEL 89/HK 510/TR6-R001/2018 tanggal 4 Januari 2018
6.	POLRES LANDAK	Kejaksaan Negeri Landak	Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 MoU tentang penegakan hukum terkait penanganan Preman dan Premanisme
7.	POLRES LANDAK	Kejaksaan Negeri Landak	Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 MoU tentang penegakan hukum terkait penanganan Terorisme

/ d. Idiologi .....

d. Idiologi

Untuk dapat mengantisipasi kerawanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, Polres Landak harus mampu mendeteksi secara dini untuk dapat mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat. Aspek kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Landak dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang secara nasional maupun regional. Penanaman, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap disosialisasikan dan diprogramkan secara berjenjang dan bertahap oleh Pemda Kabupaten Landak dengan melakukan koordinasi bersama Polres Landak dalam melakukan penggalangan kepada masyarakat yang mampu mendeteksi secara dini untuk dapat mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat, dimana:

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya sudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Landak sebagai salah satu Idiologi bangsa Indonesia dan Dasar Negara Indonesia;
- 2) Sedangkan untuk kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) sudah tidak dilaksanakan lagi, baik yang diselenggarakan dilapisan masyarakat maupun yang dilaksanakan dilembaga-lembaga pendidikan;
- 3) Faham komunisme atau Eks G.30 S.PKI yang ingin mengembalikan dan mengembangkan atau menyusupkan fahamnya tersebut di kehidupan masyarakat Indonesia serta dengan sengaja ingin menggrogoti kedaulatan Negara Keasatuan Indonesia, hal tersebut dapat membahayakan bagi kesatuan bangsa dan negara dikemudian hari;
- 4) Berdasarkan TAP MPRS nomor 225 tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme/Markisme dan Leninisme, serta instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 1981 tentang simpatisan dan keluarga tidak boleh menjadi Pegawai Negeri dan TNI/Polri, para Eks Tapol tersebut masih tetap dalam pengawasan Polres Landak.

/ 5) berdasarkan .....

- 5) Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Nomor: Kd.14.09/I/HM.00/236/2006 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak, dan surat Nomor: 02/Kab-Ldk/06-06, tanggal 12 Juni 2006, perihal melaporkan keberadaan Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia (SSYI) di wilayah Kabupaten Landak. Dijelaskan bahwa dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Landak terhadap legalitas organisasi SSYI dinyatakan **Tidak Sah**, dimana selama ini tidak ada melaporkan keberadaan dan kegiatannya. perlu adanya kewaspadaan dan pengawasan bersama antara Polri dan Pemda Kabupaten Landak didalam menyikapi tentang keberadaan organisasi SSYI tersebut, walaupun sejauh ini belum adanya laporan dari masyarakat tentang kegiatan yang dapat meresahkan, namun tetap dilakukan deteksi dini dan penggalangan terhadap adanya organisasi SSYI ataupun organisasi Radikal lainnya.
- 6) Perlu tetap diwaspadainya berkembangnya paham Komunisme gaya baru, dimana Kalimantan Barat secara langsung berbatasan dengan Negara Lain serta mudahnya akses keluar masuk ke wilayah Kalimantan Barat, serta banyaknya masyarakat Kalimantan Barat yang merupakan keturunan Tionghua yang sebagian besar masih mempunyai keluarga di Negara Tiongkok dimana Negara Tiongkok menganut Paham Komunisme, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi paham di kalangan masyarakat yang dapat memperkeruh dan mengganggu Keamanan Negara serta Kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Landak.

e. Sosial Politik

Pengaruh krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional pada tahun 2020 masih akan berlangsung di Tahun 2021 yang berdampak pada terjadinya rasionalisasi pada perusahaan-perusahaan dalam upaya efesiensi proses produksi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dilihat dari Kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Landak akan dipengaruhi oleh beberapa Aspek yang meliputi Geografi, Sumber Daya Alam, Demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta Pertahanan dan Keamanan, antara lain:

- 1) Kehidupan partai Politik dan organisasi masyarakat di Kabupaten Landak relatif tenang dan stabil serta tidak ada gejolak yang menonjol meskipun dengan era reformasi telah tumbuh beberapa partai Politik, kerawanan yang mungkin terjadi dibidang politik sehubungan dengan banyaknya partai diantaranya: terjadinya perselisihan para pendukung partai, perpecahan tubuh partai itu sendiri, tindakan intimidasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, tindakan money politik, saling menjatuhkan pasangan calon, beredarnya surat seruan ataupun surat edaran yang tidak bertanggungjawab yang dapat mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat;
- 2) Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu yang ditandai dimulainya proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun dalam implementasinya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta dapat memberikan pelayanan publik yang memadai;
- 3) Konflik internal penyelenggara Pemilu dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain; penyusunan DPT yang kurang akurat; kritik masyarakat terhadap netralitas KPU, Bawaslu, ASN, TNI dan Polri; dan kurangnya sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu berpotensi terjadinya penundaan atau mundurnya jadwal tahapan pemilu;
- 4) Adaya pasal-pasal yang bermasalah dalam UU Pemilu 2019, penataan Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, permasalahan kewenangan antara KPU dengan fraksi DPR, serta penataan Dapil yang harus memperhatikan prinsip kesetaraan antar daerah pemilihan rentan timbulnya gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan.

/ 5) Perkembangan .....

- 5) Perkembangan berdemokrasi di Indonesia pada tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh dinamika dalam berkehidupan Politik dan ekonomi. komposisi kekuatan politik baik pada lembaga legislatif (DPR RI) dan eksekutif (Presiden) akan banyak mempengaruhi dinamika politik di Indonesia dengan terselenggaranya Pemilu pada Tahun 2020 secara serentak, hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan Partai Pengusung lainnya. Di Tahun 2020 Kabupaten Landak tidak ikut dalam Demokrasi Politik Pemilu dan akan menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2022.
- 6) Dari berbagai indikator dapat diketahui kemungkinan kemajuan atau kemunduran masa depan demokrasi Indonesia. Skenario yang paling mungkin terwujud pada tahun 2020 adalah bahwa Indonesia tidak akan bergeser banyak dari posisinya yang sekarang di garis skenario, yaitu di antara “formal democracy” dan “full democracy.” Secara umum, kemungkinan Indonesia untuk mengalami democratic reversal menjadi negara otoriter atau negara gagal tidak cukup besar, kecuali jika ada kejadian besar, seperti krisis ekonomi yang parah, atau hilangnya kepercayaan terhadap negara dalam derajat yang besar sebagai akibat dari gagalnya perang melawan korupsi dan pelembagaan partai politik. Di sisi lain, Indonesia juga agaknya mengalami kesulitan untuk maju menjadi negara ‘demokrasi penuh’ atau ‘demokrasi maju’, kecuali jika Indonesia dapat memanfaatkan semua titik kritis untuk menuju ke arah yang positif, seperti perang melawan korupsi, desentralisasi yang baik, penguatan kelas menengah, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengawal demokratisasi.

/ f. Sosial .....

f. Sosial Ekonomi

- 1) perekonomian Kabupaten Landak menampakan adanya kemajuan, kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong kemajuan tersebut, pembangunan daerah relatif mampu menggerakkan komponen-komponen ekonomi untuk saling bersinergi dalam menggerakkan kegiatan perekonomian;
- 2) dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2016-2019 pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar 0.82 % dimana Tahun 2016 sebesar 4,86 % sedangkan di Tahun 2019 sebesar 5,68 %. Untuk laju pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian juga mengalami kenaikan sebesar 0.84 % di Tahun 2016 sebesar 2,98 % dan di Tahun 2019 sebesar 3,82 %. Disusul juga dengan laju pertumbuhan di bidang Industri juga mengalami kenaikan di Tahun 2016-2019 sebesar 1.16 % dari Tahun 2016 sebesar 3.66 % dan Tahun 2019 sebesar 4.82 %. Dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Landak secara keseluruhan di Tahun 2016-2019 mengalami penurunan 0,27 % jika dilihat dari Tahun 2016 sebesar 5.82 % sedangkan di Tahun 2019 sebesar 5.01 %.
- 3) produksi hutan saat ini mengalami penurunan yang sangat tajam khususnya pada sektor perkayuan hal tersebut akibat terjadinya penebangan liar baik yang dilakukan oleh perusahaan yang menebang kayu diluar RKT (Rencana Kerja Tahunan), HPH yang telah ditetapkan, serta banyaknya cukong-cukong yang mendanai masyarakat untuk melakukan penebangan secara liar dikawasan hutan lindung. Sedangkan dikawasan perbatasan Kalbar dengan Malaysia banyak terjadi penebangan liar, pencurian kayu oleh warga negara Malaysia dengan memanfaatkan masyarakat lokal;

/ 4) Keberhasilan .....

- 4) keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui berbagai indikator kemiskinan di Kabupaten Landak, Persentase penduduk Miskin di Kabupaten Landak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingannya pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Landak Tahun 2018 tercatat sebesar 43.73 persen di Tahun 2018 sedangkan di Tahun 2019 turun menjadi 43.16 %, Hal ini tentunya dapat dilihat dari keberhasilan kinerja pembangunan yang dapat dinilai dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) baik dibidang Kesehatan, Pendidikan maupun Ekonomi.
- 5) Pemerintah sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tujuannya untuk menjaga laju pertumbuhan Indonesia tidak jatuh dibawah 5 %, dengan disusunnya (RPJMN) 2020-2024 yang diselesaikan melalui kerangka teknokratisnya yang namanya reformasi structural;
- 6) untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dan cermat untuk mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Langkah-langkah tersebut juga harus didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Disamping itu pula perlu dilakukan akselerasi industri baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upaya-upaya keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Landak.

/ g. Sosial Budaya .....



g. Sosial Budaya

- 1) Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Landak pada saat ini umumnya relatif baik, terutama setelah berlalunya masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum Etnis, kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antar budaya, selain itu juga terjadi penguatan peranan kearifan lokal dalam bingkai nasional serta peningkatan pemahaman terhadap keragaman sosial budaya sehingga kondusifnya interaksi antar budaya secara positif dan konstruktif;
- 2) Kehidupan masyarakat Kabupaten Landak dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi. pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama, mayoritas umat beriman di Kabupaten Landak masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan/kepercayaan. Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. nilai-nilai ajaran agama/ kepercayaan yang diharapkan menjadi filter ternyata masih belum berfungsi sebagaimana mestinya;

/ 3) Pembangunan .....

- 3) Pembangunan Kabupaten Landak di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kabupaten Landak yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, lambat laun semakin meningkat dan berkembang;
- 4) Tidak tersedianya lapangan kerja didaerah pedesaan, sehingga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota dengan harapan dapat hidup layak, kondisi ini akan berdampak terhadap potensi gangguan dan ambang gangguan di Kota;
- 5) Perkembangan sekolah-sekolah swasta dan Universitas swasta diwilayah Kabupaten Landak sangat membantu dalam mengatasi penampungan anak didik, baik yang didirikan oleh yayasan dengan berlatar belakang agama maupun swasta murni;
- 6) Untuk tenaga pengajar khususnya didaerah-daerah terpencil, pemerintah telah melakukan upaya dengan melakukan rekrutmen dan penambahan kepada guru bantu, untuk ditempatkan di daerah pedalaman;
- 7) Kebijakan pemerintah dalam Bidang Pendidikan selalu mengalami perubahan-perubahan terutama dalam hal kurikulum pada setiap tingkat sekolah, hal ini dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan antara lain: meningkatnya angka Drop Out, Meningkatnya angka Pengangguran dan kenakalan remaja maupun bermacam-macam kejahatan. Berbagai upaya pemerintah maupun pihak swasta dibidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga guru, hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan kehidupan bangsa;

/ 8) Dari .....

8) Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan ialah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Antara lain:

- a) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
- b) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- c) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas

Terdapat jumlah sekolah SD, SMP, (SMP sederajat), SMA, (SMA sederajat) dan SMK di wilayah Kabupaten Landak Tahun 2019 sebanyak 456 sekolah, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.3**  
**Table**

**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan, 2018/2019 dan 2019/2020**  
**Number of Schools, Teachers, and Pupils in Primary Schools Under The Ministry of Education and Culture by Subdistrict, 2018/2019 and 2019/2020**

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sebangki	18	18	-	-	18	18
2. Ngabang	64	65	4	4	68	69
3. Jelimpo	33	33	1	1	34	34
4. Sengah Temila	63	63	3	3	66	66
5. Mandor	34	34	-	-	34	34
6. Menjalin	27	27	-	-	27	27
7. Mempawah Hulu	43	43	4	4	47	47
8. Sompak	15	15	-	-	15	15
9. Menyuke	39	39	3	3	42	42
10. Banyuke Hulu	19	19	-	-	19	19
11. Meranti	17	17	-	-	17	17
12. Kuala Behe	29	29	3	3	32	32
13. Air Besar	35	35	1	1	36	36
<b>Kabupaten Landak</b>	<b>436</b>	<b>437</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>455</b>	<b>456</b>

- 7) Dari hasil indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi, sesuai dengan target yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berdasarkan Out put (keluaran) dari 7 (tujuh) sasaran yang diukur terdapat 5 (lima) sasaran atau (71,43 %) dengan katagori “ **Sangat Berhasil** ” dan 2 (Dua) sasaran atau (28,57 %) dengan katagori “ **Berhasil** ” sasaran tersebut:
- a) Sasaran yang termasuk dalam katagori “Sangat Berhasil ”:
- (1) Meningkatnya pelayanan dan pemerataan pendidikan ke seluruh masyarakat;
  - (2) Meningkatnya mutu semua jenjang pendidikan;
  - (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
  - (4) Meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
  - (5) Meningkatnya efisiensi pengelolaan pendidikan.
- b) Sasaran yang termasuk dalam Katagori “ **Berhasil** ” :
- (1) Meningkatkan Pelayanan dan Penyebaran Pendidikan Kepada Masyarakat;
  - (2) Meningkatnya kualitas SDM Dinas Pendidikan.
- 8) Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja sehingga kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja untuk mendesak direvisinya undang-undang tersebut, akibat pemerintah belum mampu menciptakan kesempatan kerja di dalam negeri, telah mendorong minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan di luar negeri, dengan segala resiko yang dihadapi;

/ 10) Pertumbuhan .....

- 9) Pertumbuhan Ekonomi dan pengurangan pengangguran di Kabupaten Landak dengan rata-rata pertumbuhan tinggi diatas rata-rata dan pengurangan pengangguran dibawah rata-rata, hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, ditambah dengan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal. Hal-hal yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran, antara lain :

- a) Bertambahnya pengangguran usia muda akibat putus sekolah;
- b) Pengangguran tahun sebelumnya yang belum terserap pasar kerja;
- c) Angkatan kerja baru;
- d) Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dilihat dari rekapitulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 sebesar 2.549.844,- angka ini naik sebesar 8.5 % dari UMK Tahun 2019 sebesar 2.349.870.

- 10) Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Landak masih banyak masyarakat miskin terutama di daerah pedalaman yang belum mendapat Kesehatan dengan maksimal, selain terbatasnya jumlah rumah sakit dan tenaga medis, letak geografis yang begitu luas membuat banyak penduduk pedalaman yang masih sulit dijangkau, faktor yang mempengaruhi adalah:

- a) Luas wilayah dan kondisi alam Kabupaten Landak menjadi faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan;
- b) Kurangnya tenaga bidan untuk mengisi Poskesdes yang sudah dibangun;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat;
- d) Sulitnya mendapat data-data indikator kesehatan yang valid.

/ 11) Kurangnya .....

- 11) Kurangnya masyarakat pedesaan dalam mengelola Sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Landak yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan pada hutan, dimana masyarakat desa selalu mengambil hasil dari alam tetapi tidak menjaga kelestariannya, alam yang tersedia terbatas dan cenderung berkurang, sementara penduduk desa yang menggunakan cenderung meningkat, akibatnya kebutuhan masyarakat yang bergantung pada alam semakin berkurang, apabila dibiarkan terus menerus tanpa ada teknologi yang dapat menciptakan nilai tambah maka kemiskinan di pedesaan akan semakin meluas. Sumber daya alam yang berkurang seperti tersedianya air bersih, karena penggunaannya lebih banyak, juga sumber-sumber lain yang disediakan oleh alam. Perusakan alam antara lain disebabkan pada saat tertentu masyarakat desa menggunakan tuba untuk menangkap ikan, akibatnya habitat ikan yang ada di sungai itu mati semuanya, dengan demikian maka sangat nyata kerusakan alam oleh manusia, karena ketidak-pedulian dan mengharapkan untung banyak dengan cara yang mudah;
- 12) Masalah pertanahan di wilayah Kabupaten Landak akan terus menjadi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan terutama pada daerah pemukiman dilihat dari sektor pertanian/perkebunan maupun sektor industri dan pertambangan. Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang akan timbul apabila kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi kepada perusahaan-perusahaan besar tertentu.
- 13) Kabupaten Landak terdapat tempat-tempat pariwisata yang menjadikan obyek wisata baik lokal maupun asing, dilihat dari potensi wilayahnya terdapat Wisata Alam, Wisata Petualangan, Wisata Budaya dan Sejarah, salah satunya Kraton Ismahayana yang terletak di Kecamatan Ngabang merupakan salah satu wisata sejarah di Kabupaten Landak yang dalam setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan Februari-Maret dengan melakukan Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri yang diisi dengan kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan.

Serta upacara Naik Dango yang kegiatannya dilaksanakan dalam setiap tahunnya dengan kegiatan seputar ucapan syukur masyarakat dayak kepada sang pencipta akan hasil yang telah diperoleh.

g. Budaya/Kultur

Pembangunan Kabupaten Landak di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kabupaten Landak yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata.

h. Kependudukan/Transmigrasi

Diwilayah Kabupaten Landak tidak terdapat daerah yang dipergunakan untuk wilayah transmigrasi.

i. Giat Masyarakat

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan yang ditimbulkan dari perkembangan Informasi dan Teknologi melalui Media Massa, Televisi dan adanya persaingan Politik serta isu-isu yang ditimbulkan akan berdampak buruk bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya di wilayah Kabupaten Landak sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik minat masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum/Unjuk rasa di gedung-gedung pemerintahan baik dari masyarakat umum maupun dari mahasiswa.

j. Pertahanan dan Keamanan

- 1) kondisi Keamanan dan Ketertiban di wilayah Hukum Polres Landak relatif stabil, hal ini ditandai bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kerusuhan Sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif;

- 2) tindak kejahatan yang bersifat Konvensional, Transnasional, Kejahatan atas Kekayaan Negara, dan Kejahatan yang bersifat kontijensi masih menjadi persoalan pelanggaran hukum di Polres Landak, hal ini dapat dilihat pada angka Kriminalitas berdasarkan kualitas jenis Kejahatan /gangguan Kamtibmas pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan Jumlah Kasus :

a) persentase Jumlah penyelesaian Kasus Tahun 2018:

(1) Konvensional	L: 141	S: 130	: 92 %
(2) Transnasional	L: 3	S: 7	: 233 %
(3) Kejahatan terhadap kekayaan Negara	L: 19	S: 10	: 53 %
(4) Kontijensi	L: Nihil	S: Nihil	
JUMLAH	L: 163	S: 147	: 90 %

b) persentase jumlah penyelesaian Kasus Tahun 2019 :

(1) Konvensional	L: 99	S: 87	: 87,8 %
(2) Transnasional	L: 31	S: 30	: 96,7 %
(3) Kejahatan terhadap kekayaan Negara	L: 13	S: 8	: 61,5 %
(4) Kontijensi	L: 0	S: 0	: 0 %
JUMLAH	L: 143	S: 125	: 87,41 %

- 3) Perkembangan situasi Kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Landak mengalami penurunan kasus pada Tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya di Tahun 2018 dengan Realisasi penyelesaian di tahun 2019 sebanyak 125 kasus dari 143 kasus dengan capaian 87,41 %, sedangkan di tahun 2018 penyelesaian sebanyak 147 kasus dari 163 kasus dengan capaian 90 %. jika dilihat dari penanganan kasus berdasarkan Laporan di Tahun 2019 dibanding Tahun 2018 terdapat penurunan perkara sebanyak 19 kasus atau **11,65 %**, sedangkan pada penyelesaian kasus di Tahun 2019 sebanyak 125 kasus juga turun sebanyak 22 kasus atau sebesar **14,95 %** dibanding tahun 2018 sebanyak 147 kasus.



- 4) Data jumlah Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahun 2018-2019 yang ditangani Polres Landak, sebagai berikut:
- a) jumlah pelanggaran lalu Lintas pada tahun **2019** dengan jumlah 6.426 Kasus, meliputi:
    - (1) Tilang sebanyak : 3.089 Lembar
    - (2) Teguran : 3.337 Lembar
  - b) Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahun **2019** sebanyak 67 kasus, dengan rincian :
    - (1) Korban meninggal dunia : 33 Orang
    - (2) Luka Berat : 61 Orang
    - (3) Luka Ringan : 47 Orang
    - (4) Kerugian Materiil : Rp. 256.900.000,-
  - c) jumlah pelanggaran lalu Lintas tahun **2018** dengan jumlah 6.471 Kasus, meliputi:
    - (1) Tilang sebanyak : 3.726 Lembar
    - (2) Teguran : 2.745 Lembar
  - d) Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun **2018** sebanyak 64 kasus, dengan rincian :
    - (1) Korban meninggal dunia : 38 Orang
    - (2) Luka Berat : 40 Orang
    - (3) Luka Ringan : 27 Orang
    - (4) Kerugian Materiil : Rp. 233.750.000,-
  - e) Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Lalu Lintas yang ditangani Polres Landak di Tahun 2019 sebanyak 6.426 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebanyak 6.471 kasus, atau turun sebanyak 45 kasus dengan persentase 0,69 %.

- f) Persentase penyelesaian kasus Laka Lantas yang di tangani Polres Landak di Tahun 2019 sebanyak 67 kasus, mengalami kenaikan jika dibanding Tahun 2018 sebanyak 64 kasus, atau naik 3 kasus dengan persentase 4,68 %;
- g) Perbandingan kasus pada fatalitas korban Laka Lantas yang menunjukan korban meninggal Dunia yang ditangani Sat Lantas Polres Landak dari tahun 2018-2019 dapat dijelaskan bahwa, Pada Tahun **2019** korban meninggal dunia sebanyak 33 orang, mengalami penurunan sebanyak 5 kasus atau sebesar 13,14 % dibanding tahun sebelumnya di Tahun 2018 sebanyak 38 orang.
- 5) Perbandingan Jumlah pelayanan penerbitan SIM pertahun di Polres Landak pertahun sebanyak:

NO	PENERBITAN	TAHUN		TREND		KET
		2018	2019	ANGKA	%	
SIM BARU						
1	SIM A	1734	1737	N.3	0,17 %	
2	SIM A UMUM	0	0	TETAP	TETEP	
3	B.I	334	362	N.28	8,38 %	
4	B.I UMUM	15	39	N.24	60 %	
5	B.II	27	37	N.10	37,03 %	
6	B.II UMUM	27	25	T.2	-7,40 %	
7.	SIM C	4087	3993	T.94	-2,29 %	
JUMLAH		6224	6193	T. 31	-0,49 %	
SIM PERPANJANGAN						
1	SIM A	357	418	N.61	17,08 %	
2	SIM A UMUM	0	0	TETEP	TETEP	
3	B.I	109	107	T.2	-1,83%	
4	B.I UMUM	33	51	N.18	54,54%	
5	B.II	9	8	T.1	-11,11 %	
6	B.II UMUM	14	22	N.8	57,14 %	
7.	SIM C	1855	1676	T.179	-9,64 %	
JUMLAH		2377	2282	T.95	-3,99 %	
JUMLAH TOTAL		8601	8475	T.126	-1,46 %	

Jika dilihat dari tabel tersebut diatas, terhadap Jumlah pelayanan penerbitan SIM pertahun di Polres Landak di tahun 2019 sebanyak 8.475 lembar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 8.601 lembar mengalami penurunan sebesar T.126 lembar atau -1,46 %.

6) Jumlah pelayanan penerbitan BPKB pertahun

NO	PENERBITAN	TAHUN		TREND		KET
		2018	2019	ANGKA	%	
BPKB						
1	BPKB BARU	5070	5079	N.9	0,18%	
2	BPKB BALIK NAMA	301	218	T.83	-27,57%	
3	BPKB PERUBAHAN	229	371	N.142	62,01%	
4	BPKB MUTASI MASUK	478	355	T.123	-25,73%	
JUMLAH		6.078	6.023	T.55	-0,90%	

Persentase jumlah pelayanan penerbitan BPKB pertahun di Polres Landak Tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak T.55 buku dari 6.023 buku yang diterima dibanding tahun 2018 sebanyak 6.078 buku dengan persentase -0,90 %.

7) Jumlah Pelayanan penerbitan STNK pertahun

NO	PENERBITAN	TAHUN		TREND		KET
		2018	2019	ANGKA	%	
STNK						
1	a. STNK Baru	5070	5079	N.9	0,18%	
2	b. STNK Perpanjangan 5 tahun	2844	2846	N.2	0,07%	
3	c. STNK Perubahan	523	831	N.308	58,89%	
4	d. STNK Mutasi Masuk	484	385	T.99	-20,45%	
5	e. Pengesahan STNK	20.112	20.951	N.839	4,2 %	
JUMLAH		29.033	30.092	T.1.089	-3,6%	

8) Jumlah pelayanan penerbitan TNKB pertahun

NO	PENERBITAN	TAHUN		TREND		KET
		2018	2019	ANGKA	%	
TNKB						
1	a. STNK Baru	5070	5079	N.9	0,18%	
2	b. STNK Perpanjangan 5 tahun	2850	2769	N.2	0,07%	
3	c. STNK Perubahan	444	481	N.308	58,89%	
4	d. STNK Mutasi Masuk	498	385	T.99	-20,45%	
5	e. Penggunaan TNKB lainnya	0	0	N.839	4,17%	
JUMLAH		8.869	8.714	T.155	-1.8%	

/ 9) Jumlah .....

9) Jumlah pelayanan penerbitan SKCK pertahun

NO	SISA STOCK MATERIL TAHUN 2019	PENAMBAHAN STOCK MATERIL TAHUN 2019	JUMLAH	MATERIIL TH 2019			KETERANGAN
				TERPAKAI	RUSAK	SISA	
	7.810	4000	11.810	3.070	91	8.649	Penambahan Dibulan Juni Sebanyak 4000 Lembar di tahun 2019

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pelayanan penerbitan SKCK di Tahun 2019 terdapat penambahan sebesar 4000 lembar pada bulan juni 2019 dengan sisa Stock materil yang terpakai sebanyak 7.810 lembar dengan jumlah 11.810 lembar. Untuk materil yang terpakai hingga bulan Desember 2019 sebanyak 3.070 lembar dan rusak sebanyak 91 lembar dengan sisa akhir saat ini sebanyak 8.649 lembar.

k. Perbatasan

Wilayah Polres Landak **tidak berbatasan langsung** dengan Negara Malaysia namun jalur lalu lintas Polres Landak dilalui oleh Kendaraan dari 2 (Dua) Negara Tetangga yakni Brunei Darusalam dan Negara Malaysia melalui jalur perbatasan Entikong menuju Pontianak, dimana dapat dimungkinkan Polres Landak menangani dan mengantisipasi adanya kejahatan Transnasional.

### 3. Analisis SWOT

Dari aspek tersebut diatas dilakukan analisa perkembangan lingkungan yang meliputi **Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)**:

a. **Kekuatan (Strenghts)**

- 1) Postur kekuatan Polres Landak sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar sampai ditingkat Kecamatan dengan memiliki struktur 1 (satu) Polres, 10 Polsek (Polsek : 1 Urban, 9 Rural), dan 8 Pos Pol.

Dengan 3 (Tiga) Kecamatan yang belum memiliki Polsek antara lain:  
**Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Banyuke Hulu dan Kecamatan Sompak.**

- 2) Jumlah Personel Polres Landak pada Tahun 2020 sebanyak **442** Personel dengan PNS 1 Orang, jika dibandingkan jumlah Penduduk Kabupaten Landak sebanyak **401.147** Jiwa maka Rasio perbandingan 1 : 907 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Mapolres Landak Polri : 258 Org PNS
- b) Polsek Ngabang Polri : 37 Org PNS : 1 Org
- c) Polsek Sengah Temila Polri : 24 Org PNS
- d) Polsek Mandor Polri : 20 Org PNS
- e) Polsek Sebangki Polri : 13 Org PNS
- f) Polsek Menjalin Polri : 17 Org PNS
- g) Polsek Mempawah Hulu : 18 Org PNS
- h) Polsek Menyuke Polri : 16 Org PNS
- i) Polsek Meranti Polri : 12 Org PNS
- j) Polsek Kuala Behe Polri : 14 Org PNS
- k) Polsek Air Besar Polri : 13 Org PNS

- 3) Persentase Jumlah kekuatan personil Polres Landak berdasarkan DSP pada Tahun 2020 :

- a) Polri

NO	PANGKAT	DSP	RIIL	PROSENTASE 100 (%)
1	AKBP	1	1	100
2	KOMPOL	5	5	100
3	AKP	30	5	16.66
4	INSPEKTUR	190	30	15.78
5	BINTARA	787	400	50.82
6	TAMTAMA	-	-	-
7	PNS Gol II D	58	1	1,7
JUMLAH		1.071	442	41,26

/ PNS .....

b) PNS

Jumlah Personel PNS Polres Landak sesuai DSP sebanyak 58 Anggota terealisasi 1 Anggota dengan kepangkatan II D sehingga mengalami kekurangan 57 personel PNS.

- 4) dalam membangun postur Polri yang professional, bermoral, modern, dan unggul, Polres Landak melalui perubahan mindset dan culture set, dalam upaya untuk menambah jumlah personel Polri yang memiliki standar kompetensi perlu melakukan peningkatan jumlah pendidikan dan latihan sesuai dengan bidang tugasnya.

JENIS PENDIDIKAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Diktuk	-	-	-
Dikbangum	1	3	2
Dikbangpers	3	5	7
PAG	1	3	1
Pelatihan	52	94	92
Total	57	105	102

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa Polres Landak selama kurun waktu 2017-2019 dalam pengembangan peningkatan personel melalui Dikbangum, Dikbangpers dan PAG belum adanya peningkatan capaian indikator kinerja terkait dengan jumlah personel polri yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya sesuai target/kuota.

5) Dislokasi Personel

Data Jumlah Personel Polres Landak dan Polsek Jajaran Tahun 2020 berdasarkan struktur organisasi mengacu pada Perkap 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek, sebanyak 442 personel dengan PNS 1 orang, dengan perincian sebagai berikut:

/ Tabel .....

NO	STRUKTUR	JUMLAH	PERSONEL		
			POLRI	PNS	
1.	Kapolres / Waka	2	Polri	-	
2.	Bag Ops	11	Polri	-	
3.	Bagren	7	Polri	-	
4.	Bag Sumda	18	Polri	-	
5.	Sium	10	Polri	-	
6.	Si Keu	5	Polri	-	
7.	Sipropam	10	Polri	-	
8.	Siwas	4	Polri	-	
9.	SPKT	12	Polri	-	
10.	Sat Intelkam	24	Polri	-	
11.	Sat Reskrim	33	Polri	-	
12.	Sat Resnarkoba	8	Polri	-	
13.	Sat Sabhara	55	Polri	-	
14.	Sat Lantas	42	Polri	-	
15.	Sat Binmas	8	Polri	-	
16.	Sat Tahti	3	Polri	-	
17.	Si Tipol	3	Polri	-	
18.	Polsek Ngabang	37	Polri	1	
19.	Polsek Sengah Temila	24	Polri	-	
20.	Polsek Mandor	20	Polri	-	
21.	Polsek Menjalin	17	Polri	-	
22.	Polsek Mempawah Hulu	18	Polri	-	
23.	Polsek Menyuke	16	Polri	-	
24.	Polsek Air Besar	13	Polri	-	
25.	Polsek Kuala Behe	14	Polri	-	
26.	Polsek Sebangki	13	Polri	-	
27.	Polsek Meranti	12	Polri	-	
28.	Pa dan Ba Polres	3	Polri	-	
JUMLAH		441	Polri	1	442

6) Data Jumlah materiil dan fasilitas Polres Landak dan jajaran adalah:

a) Kendaraan bermotor umum :

(1)	Sepeda Motor	:	236	Unit
(2)	Jeep	:	5	Unit
(3)	Sepeda Patroli	:	15	Unit
(4)	Truck Sedang	:	3	Unit
(5)	Mini Bus	:	3	Unit
(6)	Bus Kecil	:	1	Unit

/ b) Kendaraan .....

## b) Kendaraan khusus

- (1) Ran pat R 2 : 15 Unit
- (2) Ran pat sedan : 3 Unit
- (3) Pick up : 9 Unit
- (4) Rantis water cater canon : 1 Unit
- (5) Ran/pengawalan : 1 Unit
- (6) Ran Taktis : 1 Unit
- (7) Double cabin : 8 Unit
- (8) Ran Laka lintas : 1 Unit

## c) Kendaraan air

Speed Boat (40 PK) : 2 Unit

## d) Senjata Api (Senpi)

- (1) Genggam : SP : 217 Pucuk
- (2) Senpi Bahu : SP : 93 Pucuk
- (3) Senjata Pelontar : SP : 17 Pucuk

## 7) Alsus Satker Polres Landak

NO	JENIS	MAPOLRES LANDAK				POLSEK JAJARAN				KET
		BB	RR	RB	JMLH	BB	RR	RB	JMLH	
1	<b>ALSUS POL BIASA</b>									
	a. borgol	20	-	-	20	55	-	-	55	
	b. Borgol Karet	100	-	-	100	-	-	-	-	
	c. Handy Talky	350	-	-	350	-	-	-	-	
	d. Tongkat Karet (Lurus)	-	-	-	-	200	-	-	200	
	e. Telephon	2	-	-	2	2	-	-	2	
	f. Rangsang Lapangan	30	-	-	30	-	-	-	-	
	g. Pilbed	60	-	-	60	-	-	-	-	
	h. Megaphone	3	-	-	3	24	-	-	24	
	i. Wireles	4	-	-	4	-	-	-	-	
	j. HF/SSB	2	-	1	3	7	-	2	9	
	k. Repeater	3	-	-	3	-	-	-	-	
	l. Solar Call	-	-	-	-	3	-	-	3	
	m. Antena Tower	1	-	-	1	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>575</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>576</b>	<b>291</b>		<b>2</b>	<b>293</b>	



## 10) Alsus yang ada di Sat Reskrim

NO	JENIS	MAPOLRES LANDAK				POLSEK JAJARAN				KET
		BB	RR	RB	JMLH	BB	RR	RB	JMLH	
2	<b>ALSUS SAT RESKRIM</b>									
	a. Refitalisasi Inafis Kit	2	1	-	3	3	-	3	3	
	b. Tes Kit Reskrim	2	-	2	4	-	-	-		
	c. Tes Kit TKP	3	-	-	3	-	-	-		
	d. Police Line	1	-	-	1	-	-	-		
	e. Alat Detilskopi	-	-	-	-	-	-	-		
	- Finger Print	2	-	-	2	-	-	-		
	- Gunting	1	-	-	1	-	-	-		
	- Pinset	2	-	-	2	-	-	-		
	- Sarung Tangan	4	-	-	4	-	-	-		
	- Magnetik Laten pp	3	-	-	3	-	-	-		
	- Print Powder	3	-	-	3	-	-	-		
	- Sendok Mayat	2	-	-	2	-	-	-		
	- Ninhidrin (10 Gr)	1	-	-	1	-	-	-		
	- Lodine (25 Gr)	1	-	-	1	-	-	-		
	- Perata Tinta	8	-	-	8	-	-	-		
	- Plastik BB	2	-	-	2	-	-	-		
	- Penggaris	1	-	-	1	-	-	-		
	- masker (Kotak)	1	-	-	1	-	-	-		
	- Tanda Batas	1	-	-	1	-	-	-		
	- Rubber	1	-	-	1	-	-	-		
	- Meteran	10	-	-	10	-	-	-		
	- Amplop BB	10	-	-	10	-	-	-		
	- Kartu AK-23	1	-	-	1	-	-	-		
	- Papan Altur	1	-	-	1	-	-	-		
	- No.BB	1	-	-	1	-	-	-		
	- label Mayat	1	-	-	1	-	-	-		
	f. Slip Jari	-	-	-	-	-	-	-		
	- Tinta Sidik Jari	2	-	-	2	-	-	-		
	- Kuas Sidik Jari	2	-	-	2	-	-	-		
	g. Kaca Pembesar / Loup	3	-	-	3	-	-	-		
	h. Kantong Mayat	1	-	-	1	-	-	-		
	i. Kamera Foto	1	-	-	1	-	-	-		
	j. Kamera Digital	1	-	-	1	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## 11) Alsus yang ada di Sat Binmas

NO	JENIS	MAPOLRES LANDAK				POLSEK JAJARAN				KET
		BB	RR	RB	JMLH	BB	RR	RB	JMLH	
3	<b>ALSUS BINMAS</b>									
	a. Wireles	8	-	-	8	-	-	-	-	
	b. Megaphone	17	-	-	17	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

12) Alsus yang ada di Sat Sabhara/ Dalmas

NO	JENIS	MAPOLRES LANDAK				POLSEK JAJARAN				KET
		BB	RR	RB	JMLH	BB	RR	RB	JMLH	
4	<b>ALSUS SABHARA</b>									
	a. Tameng Fiber	152	2	-	154	-	-	-	-	
	b. Helm PHH/ Dalmas	131	25	-	156	-	-	-	-	
	c. Rompi PHH/Dalmas	30	3	-	33	-	-	-	-	
	d. Pelindung Tangan/Kaki	153	-	-	153	-	-	-	-	
	e. Tongkat T	190	-	-	190	-	-	-	-	
	f. Quick Respon	3	-	-	3	-	-	-	-	
	g. Gas Masker	126	-	-	126	-	-	-	-	
	h. Gas Air Mata	40	-	-	40	-	-	-	-	
	i. Tabung Pemadam Api	4	-	-	4	-	-	-	-	
	j. Video Kamera	1	1	-	2	-	-	-	-	
	k. Megaphone	3	-	-	3	-	-	-	-	
	l. Radio Mobil	1	1	-	2	-	-	-	-	
	m. Base Station	1	-	-	1	-	-	-	-	
	n. Telephone	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	835	32	-	867		-	-	-	

13) Alsus yang ada di Sat Lantas

NO	JENIS	MAPOLRES LANDAK				POLSEK JAJARAN				KET
		BB	RR	RB	JMLH	BB	RR	RB	JMLH	
5	<b>ALSUS LANTAS</b>									
	a. Megaphone	3	-	-	3	-	-	-	-	
	b. Senter Kedip	13	2	3	18	-	-	-	-	
	c. Rompi Lantas	15	-	-	15	-	-	-	-	
	d. Helm Lantas	19	-	1	20	-	-	-	-	
	e. Senter Pluit	10	-	-	10	-	-	-	-	
	f. Trafick Coon	16	-	-	16	-	-	-	-	
	g. Kantong Mayat	10	-	-	10	-	-	-	-	
	h. Telephone	2	-	-	2	-	-	-	-	
	JUMLAH	88	2	4	94		-	-	-	

- 14) Semakin meningkatnya dukungan anggaran APBN dari tahun ke tahun yang dialokasikan untuk mendukung Polres Landak dan Jajarannya dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok Polri;

/ 15). Terjalannya .....

- 15) Terjalannya hubungan antar Kementerian/Lembaga melalui Komitmen bersama dengan Pemda Kabupaten Landak, Kajari Ngabang, Batalyon Armed, Dan Denpom Ngabang dalam rangka pencegahan dan Penindakan guna mengantisipasi adanya Gangguan Kamtibmas yang terjadi diwilayah Kabupaten Landak, melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan memberantas tindak pidana 4 jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) dan kasus-kasus yang menjadi atensi Pimpinan Polri;
- 16) Polres Landak dalam melaksanakan program Sinergi Polisional sebagai sarana membangun kemitraan dengan masyarakat melalui Inovasi pelayanan Publik secara terpadu yaitu pelayanan SKCK, SPKT dan IDENTIFIKASI (sidik jari) serta terintegrasinya Pelayanan Pemerintah, BUMN dan Swasta dalam satu tempat yaitu **Mall Pelayanan Publik** (MPP) Kabupaten Landak yang diberinama MPP Kota Intan yang lokasinya berada di Pasar Tradisional Dara Itam Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Mall Pelayanan Publik (MPP) dan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 503/17/HK-2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi dan Nama MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) Kabupaten Landak.
- 17) Komitmen Polres Landak untuk meningkatkan profesionalisme anggota melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polres Landak berdasarkan Keputusan Kapolda Kalbar Nomor: Kep/62/I/REN.2.3./2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Satker Polda Kalbar sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dimana Polres Landak diikutsertakan kembali didalam meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2020.

/ 18) meningkatkan .....

- 18) Terselenggaranya dan terkoneksiya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan menyediakan layanan pada Website [www.rbppolreslandak.com](http://www.rbppolreslandak.com) dan [www.polreslandak.com](http://www.polreslandak.com) (Humas Polres Landak) yang terkoneksi dengan IKM Mabes Polri dengan website [www.ikanmas.net](http://www.ikanmas.net)
- 19) Kondisi Satpas belum memadai yang menyebabkan antrian permohonan SIM.

b. **Kelemahan (Weaknesses)**

- 1) Polres Landak belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada komunitas terkecil dikarenakan :
  - a) Jumlah personel Mapolres Landak sesuai DSP sebanyak 1.071 Polri Riil sebanyak 442 personel Polri kurang **629** personel dan PNS sesuai DSP sebanyak 58 anggota Riil 1 Orang kurang 57 Orang anggota dilihat dari:
    - (1) Jumlah Personel Polres Landak sesuai DSP sebanyak **517** personel Polri Riil sebanyak **258** personel kurang -259 personel;
    - (2) Jumlah Personel Polsek Jajaran sesuai DSP sebanyak **554** Personel Polri Riil sebanyak **184** personel kurang -370 personel.
  - b) Jika dilihat dari struktur wilayah bahwa Kabupaten Landak memiliki 13 Kecamatan sedangkan didalam struktur organisasi pada Satker Polres Landak memiliki 10 Polsek namun masih terdapat 3 Polsek belum memiliki kantor dinas yaitu :
    - (1) Polsek Sompak
    - (2) Polsek Banyuke Hulu
    - (3) Polsek Jelimpo

/ 2) Kemampuan .....

2) Kemampuan anggota yang bertugas dilapangan masih kurang, khususnya personel yang bertugas di Polsek jajaran yang merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok Polri, demikian juga personel Polri yang mengisi Pos Pelayanan Kepolisian dilapangan dihadapkan tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri dirasakan semakin tinggi yang mengakibatkan:

- a) Keterbatasan sarana prasarana serta Peralatan Khusus (Alsus) termasuk peralatan komunikasi untuk mendukung penugasan operasional dilapangan baik pada tingkat satuan di lingkungan Mapolres sampai dengan ditingkat Polsek dihadapkan tuntutan masyarakat akan kehadiran anggota Polri secara cepat, tepat, kapan saja dan dimana saja;
- b) Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (**Polmas**) khususnya Bhabinkamtibmas di Polsek jika diisi 1 (satu) personel per Desa, dimana saat ini Bhabinkamtibmas Polsek berjumlah **51 (Lima puluh Satu)** Personel sedangkan jumlah Desa di wilayah Kabupaten Landak sebanyak 156 Desa. sehingga belum sebanding dalam penerapan sesuai Tupoksi dilapangan, hal ini masih sangat diperlukan peningkatan personel dan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;

b. **Peluang (*Opportunities*)**

- 1) Sistem Desentralisasi/Otonomi Daerah yang mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan faktor penting yang menunjang pelaksanaan tugas Polres Landak dan Jajaran;
- 2) Komitmen bersama antara Pemda Kabupaten Landak untuk selalu bersama-sama dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas dan menegakan hukum diwilayah hukum Polres Landak;

/ 3) Adanya .....

- 3) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak kepada Polres Landak dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Landak melalui Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, Pemilukada Gubernur /Wakil Gubernur;
- 4) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Landak dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama dan layanan 110 (Call Centre);
- 5) Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, BPK, Ombudsman, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
- 6) Adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas perencanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Landak;

c. **Ancaman (*Threats*)**

- 1) Angka pelanggaran hukum dan indikator kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polres Landak terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (***Transnational Crime***) meliputi :
  - a) Pelanggaran lintas batas orang dan barang.
  - b) Trafficking In Person.
  - c) Penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.
  - d) Penyelundupan kendaraan.
  - e) Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Trading dan Illegal Fishing;
  - f) Pengaruh budaya/adat istiadat.

/ 2) Wilayah .....

- 2) Wilayah Kabupaten Landak yang memiliki luas 9.909,10 Km<sup>2</sup> dan panjang jalan 2.179,21 Km merupakan wilayah yang cukup luas dan berbatasan dengan Kabupaten Lain seperti: Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang, merupakan jalur Transportasi darat yang dapat dijadikan tempat persinggahan dan Transaksi illegal serta timbulnya Tindak kejahatan baik dari dalam maupun Luar Negeri seperti Malaysia;
- 3) Masalah Sara perlu diperhatikan meskipun nampaknya secara kualitas yang timbul ke permukaan relative kecil namun sewaktu-waktu akan dapat berkembang sehubungan situasi kondisi pada saat sekarang adanya kelompok-kelompok Provokator yang dapat memanfaatkan situasi yang berkembang dengan jalan menghasut, mempengaruhi dan menyebarkan isu-isu untuk memperkeruh/ memperuncing masalah yang terjadi di masyarakat;
- 4) Jumlah kecelakaan lalulintas cukup memprihatinkan, jika penanganannya kurang cermat dapat mengganggu stabilitas, beberapa faktor terjadinya laka lantas adalah kurang disiplinnya pemakai jalan raya, volume kendaraan semakin meningkat dan tidak sesuai dengan pembangunan jalan serta kendaraan yang kurang memenuhi syarat dan kondisi jalan serta faktor cuaca;
- 5) Kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai. Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, Buruh, kelompok islam radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;
- 6) Berdasarkan data yang ada kasus Curat cenderung meningkat, modus operandinya bervariasi dengan motif perekonomian masih tetap dominan, terjadinya tindak pidana kejahatan dilakukan selesai panen, menjelang hari raya, Natal dan tahun baru, penyebabnya adalah situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, lapangan kerja terbatas serta pengangguran semakin meningkat;

- 7) Masalah perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang digunakan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah masuk dalam wilayah hutan masyarakat/tanah adat dan ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma;
- 8) Hasil pelaksanaan Pilkada dan Pilpres Tahun 2018-2019 akan mempengaruhi pemerintahan di Kabupaten Landak, serta akan menentukan kebijakan-kebijakan baru di pemerintahan Kabupaten Landak;
- 9) Tuntutan kesejahteraan tenaga kerja/buruh perusahaan masih akan terjadi apabila keseluruhan kewajiban tenaga perusahaan belum dilaksanakan, seperti pembayaran upah, pembayaran THR dan jaminan kesehatan untuk masing-masing karyawan/buruh;
- 10) Masih maraknya penyalahgunaan Narkotika dan pelaku tindak pidana Konvensional dikalangan masyarakat, dimana pelaku tindak pidana melibatkan kalangan anak dibawah umur.
- 11) Masih lemahnya penerapan hukum positif diwilayah Polres Landak dan Polsek jajaran yang masih memberlakukan/menerapkan hukum adat oleh masyarakat tertentu, dimana hukum adat itu sendiri sering dikomersilkan oleh oknum pemangku adat, sehingga menjadi salah satu hambatan/kendala dalam pelaksanaan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum;

#### **4. Identifikasi Masalah**

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polri pada tahun 2021 diprediksi akan semakin berat, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

/ a. Letak .....



- a. Letak Kabupaten Landak yang Strategis diantara beberapa Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah serta dilewati jalan Nasional yang menghubungkan Negara tetangga, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Landak sebagai perlintasan maupun sebagai sasaran pemasaran barang-barang Illegal dari Luar Negeri khususnya Malaysia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu;
- b. Disisi lainnya sehubungan dengan perkembangan Kabupaten Landak serta banyaknya perusahaan asing maupun investor asing yang berada di Kabupaten Landak juga mempengaruhi banyaknya pendatang yang juga mengadu nasib dan bekerja di Kabupaten Landak baik dari dalam Negeri maupun dari warga negara asing, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat;
- c. Melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Landak seperti logam mulia dan batu mulia yang belum dikelola pemerintah dengan baik serta maraknya penambang tanpa ijin (PETI) dapat mengakibatkan rusaknya hutan maupun tanah serta tercemarnya air;
- d. Adanya kelompok maupun aliran kepercayaan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran serta norma agama dan telah dilarang oleh pemerintah dapat menimbulkan aksi sosial maupun aksi penolakan dari masyarakat sekitar tempat domisili kelompok tersebut;
- e. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 secara serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19 dapat berakibat semakin banyak timbulnya pelanggaran, kecurangan dan sorotan public atas penyelenggaraan Pemilukada. Hal ini tidak menutup kemungkinan suhu politik di Indonesia dapat meningkat dengan adanya perwakilan dari pasangan calon yang diusung oleh partai Politik sehingga dapat mengakibatkan adanya kampanye-kampanye terselubung, serta adanya propaganda politik;
- f. Perkembangan masalah lalulintas dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk di wilayah Kabupaten Landak tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan dan kesadaran dari pengguna jalan mengakibatkan terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas;

- g. Terjadinya permasalahan status batas wilayah hasil pemekaran dapat mengakibatkan terjadinya konflik masyarakat;
- h. Penanganan kasus yang menjadi sorotan publik tidak dapat ditangani secara optimal, sehingga akan menjadi tuntutan dari masyarakat melalui aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa;
- i. Masih ditemukan adanya anggota yang melakukan pelanggaran baik Kode Etik, Disiplin maupun tindak Pidana yang merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, hal ini diakibatkan kurangnya kontrol dan pengawasan didalam memberikan arahan dan penyuluhan hukum serta kurangnya kesadaran bagi anggota itu sendiri didalam tugas sesuai dengan tupoksinya;
- j. Kualitas pelayanan publik di Polres Landak semakin membaik dengan dilakukannya pengembangan pembangunan melalui sentra pelayanan terpadu SIM, SKCK, SPKT dan IDENTIFIKASI. Hal ini tentunya masih adanya kekurangan terkait dengan sertifikasi personel pada pelayanan SKCK, hal tersebut telah dilakukan pengusulan terhadap personel untuk mengikuti pendidikan guna mendapatkan Sertifikasi;
- k. Wilayah Polres Landak walaupun tidak berbatasan langsung dengan Malaysia batas wilayahnya berdampingan dengan batas wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang, dimana ke 2 (Dua) Kabupaten tersebut merupakan batas wilayah yang merupakan jalan transportasi sebagai lintas sektoral yang dapat dilalui dari Negara tetangga yaitu Malaysia, melalui Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, hal tersebut memungkinkan adanya jalan transaksi barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah Kabupaten Landak dan adanya kejahatan Transnasional maupun Konvensional;
- l. Kondisi Satpas Polres Landak belum memadai untuk mengoptimalkan permohonan SIM, hal tersebut perlunya diusulkan kembali untuk pembangunan Satpas prototype pada Satpas SIM kedalam Belanja Modal T.A. 2021;

/ m. Masih .....

- m. Masih adanya pertambangan tanpa ijin dan illegal logging di wilayah Kabupaten Landak yang belum dapat diatasi, walaupun dari segi keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan baik pemerintah Kabupaten Landak maupun dari Polres Landak telah dilakukan sosialisasi melalui pertemuan, pemasangan brosur berupa larangan dan dilakukan penertiban, namun masih saja oknum masyarakat yang mengambil kesempatan untuk melakukannya.
- n. Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan pengawasan rutin terkait bidang Anggaran dan pengorganisasian di masing-masing subsatker sesuai Tupoksi untuk mewujudkan pelayanan Polres Landak yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- o. Terpenuhinya Sarpras Polres Landak sampai kewilayahan sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam Polres Landak yang perlu ditingkatkan mengingat Sarpras sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

/ BAB II .....

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **II. Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Visi dan Misi**

###### **a. Visi dan Misi Polda Kalbar**

###### **1) Visi Polda Kalbar**

“Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Aman dan Tertib”.

###### **2) Misi Polda Kalbar**

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat”

###### **b. Visi dan Misi Polres Landak**

###### **1) Visi Polres Landak**

“Terwujudnya Kabupaten Landak Yang Aman dan Tertib”.

###### **2) Misi Polres Landak**

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kabupaten Landak”

##### **2. Tujuan Jangka Menengah**

###### **a. Nasional**

Adapun tujuan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 bidang pertahanan dan keamanan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Adapun tema Pembangunan yaitu: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Perlindungan Sosial dan Ketahanan Bencana

/ b. Tujuan .....

b. Tujuan jangka menengah Polri

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah NKRI;
- 2) Menegakan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) Modernisasi Pelayanan Polri;
- 4) Mewujudkan Polri yang Profesional;
- 5) Menerapkan Manajemen Polri yang terintegrasi dan Terpercaya.

c. Tujuan jangka menengah Polda Kalbar

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kalimantan Barat;
- 2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) Modernisasi Pelayanan Polda Kalimantan Barat;
- 4) Mewujudkan Polda Kalbar yang Profesional;
- 5) Menerapkan Manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan Terpercaya.

d. Tujuan jangka menengah Polres Landak

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Landak;
- 2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) Modernisasi Pelayanan Polres Landak;
- 4) Mewujudkan Polres Landak yang Profesional;
- 5) Menerapkan Manajemen Polres Landak yang terintegrasi dan Terpercaya.

### **3. Sasaran Prioritas**

a. Nasional

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

/ 1) Pembangunan .....

- 1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Pembangunan Manusia;
- 2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan penguatan konektivitas;
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;
- 5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

b. Sasaran Prioritas Polri Tahun 2021

Sasaran Prioritas Polri tahun 2021 terdapat pada surat edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama : “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan NKRI”;
- 2) Kedua : “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”;
- 3) Ketiga : “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
- 4) Keempat : “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”;
- 5) Kelima : “Pengembangan Almitsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;
- 6) Keenam : “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.

/ c. Sasaran .....

c. sasaran Prioritas Polda Kalbar Tahun 2021

Sasaran Prioritas Polri tahun 2021 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2021, maka Polda Kalbar menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut:

- 1) Pertama : “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat”;
- 2) Kedua : “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar”;
- 3) Ketiga : “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
- 4) Keempat : “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kalbar”;
- 5) Kelima : “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;
- 6) Keenam : “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.

d. Sasaran prioritas Polres Landak Tahun 2021.

Sasaran Prioritas Polres Landak tahun 2021 mengacu kepada surat edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2021, maka Polres Landak menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut:

/ 1) Pertama .....

- 1) Pertama : “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Kabupaten Landak”;
- 2) Kedua : “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polres Landak”;
- 3) Ketiga : “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
- 4) Keempat : “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Landak”;
- 5) Kelima : “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;
- 6) Keenam : “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.

/ BAB III .....



### BAB III

## PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN ARAH KEBIJAKAN POLRI TAHUN 2021

### III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2021

#### 1. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas nasional tahun 2021 dalam rangka Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Keamanan adalah sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi;
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

#### 2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2021

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas Polda Kalbar yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor industri, pariwisata dan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di wilayah Kalimantan Barat”** yaitu:

- 1) peran Intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

/ meningkatkan .....

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial;
  - b) terdeteksinya gangguan Kamtibmas (PG, AG, GN) di seluruh wilayah hukum Polda Kalbar;
  - c) tergelarnya operasi intelijen Polda Kalbar dengan kemampuan deteksi aksi, peringatan dini, cegah dini melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya.
- 2) Meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memetakan potensi terorisme aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
  - b) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
  - c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
  - d) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, baik secara rutin atau dialogis serta gabungasn dengan TNI pada tempat-tempat yang berpotensi rawan kejahatan dan gangguan kamtibmas serta terorisme;
  - e) menghadirkan anggota Polri di setiap kegiatan masyarakat;

/ f) meningkatkan .....

- f) meningkatkan pelatihan kemampuan personel dan satwa anjing sehingga siap digunakan dalam membantu tugas kepolisian untuk pelacakan dan penangkalan;
  - g) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi.
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat Kalbar dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui "Community Policing". untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan dengan menguatkan program Polmas dengan penggelaran Bhabinkamtibmas satu Polisi satu desa/kelurahan untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan kamtibmas;
  - b) membentuk dan membina kelompok potensi masyarakat;
  - c) pemberdayaan kemitraan dengan lembaga/pranata masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas dalam upaya memelihara dan memantapkan kamtibmas.
- 4) Penanganan konflik secara humanis
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) antisipasi konflik sosial di seluruh wilayah hukum Polda Kalbar yang meliputi pilkada, sengketa lahan, kenaikan harga bahan pokok, dan lain lain;
  - b) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas di masyarakat guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;

- c) melaksanakan penggalangan secara efektif terhadap tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda untuk dapat berperan serta dalam menetralsir konflik yang terjadi di masyarakat;
- d) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan informasi dan berperan aktif mencegah terjadinya konflik.

5) **Mewujudkan Kamseltibcarlantas Polda Kalbar;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas;
- b) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c) melakukan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d) mendukung pembangunan back office, dan networking di bidang lalu lintas sebagai implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas guna membangun sistem pelayanan prima kepolisian di bidang lalu lintas;
- e) membangun budaya tertib lalu lintas;
- f) menghadirkan personel berseragam di tempat-tempat kegiatan masyarakat, sekolah, pasar, tempat ibadah).

6) **Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/ a) meningkatkan .....

- a) meningkatkan koordinasi dengan BNPB provinsi dan kota untuk melaksanakan latihan bersama guna penanggulangan bencana alam di wilayah Kalbar;
  - b) menyiapkan personel dan sarana prasarana SAR air, darat dan udara guna terlaksananya upaya preemtif dalam rangka pencegahan rawan bencana di wilayah hukum Polda Kalbar;
  - c) penanggulangan bencana alam di wilayah hukum Polda Kalbar dilakukan secara profesional;
- 7) **Penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pendekatan penanganan unjuk rasa secara dialogis dan humanis di wilayah hukum Polda Kalbar;
- b) penggelaran satuan operasional untuk penanganan unjuk rasa anarkis (Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huruhara);
- c) menyiapkan jumlah kebutuhan kekuatan personel pasukan PHH/ pasukan anti anarkis untuk mem-back up pengamanan unjuk rasa di kewilayahan;
- d) melaksanakan kegiatan rutin latihan fungsi kepolisian dalam rangka membentuk performa personel yang siap, teruji dan handal dalam upaya menangani berbagai kegiatan pengamanan unjuk rasa yang terjadi di kewilayahan;

/ e) menyiapkan .....

- e) menyiapkan dan melaksanakan penggelaran sarana dan prasarana secara rutin serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa di kewilayahan;
- f) terjalinnya soliditas dan sinergitas Polri dengan TNI pada semua tingkatan;
- g) terselenggaranya pertemuan periodik Polda Kalbar dengan K/L, aparat penegak hukum lain dan Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- h) melakukan koordinasi dan latihan gabungan Polri dengan TNI.

**8) Peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan partisipasi dan memberi kesempatan kepada personel Polri di Polda Kalbar yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;
- b) penguatan kerja sama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya;
- c) meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak kamling dan menyelesaikan potensi kerawanan sosial;
- d) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders terkait.

**9) Penggelaran patroli Polri Kapal dan pesawat udara Polri di wilayah industri, pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;**

/ Untuk .....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan pemantauan dan patroli pantai, sungai dan laut yang didukung oleh kemampuan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda dan Satpolair Polres;
- b) meningkatkan pelatihan fungsi teknis di bidang patroli perairan;
- c) meningkatkan keamanan perairan pantai, sungai dan laut melalui operasi dan patroli dengan dukungan peralatan yang terpelihara dan siap pakai;
- d) melaksanakan operasi terintegrasi terkait keamanan kelautan dengan Bakamla;
- e) mengajukan usulan pengadaan penambahan almatsus Patroli kapal.

- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kedua Polda Kalbar Tahun 2021 yaitu **“Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- 1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) pembangunan dan peningkatan Faskes Polda Kalbar dalam rangka pelayanan kesehatan, untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
  - b) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
  - c) melaksanakan pengadaan Alsuspol yang modern dan berbasis TIK;
  - d) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;

- e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
  - f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
- 2) Peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan anggota Polri;
  - b) melaksanakan peningkatan profesionalisme kerja petugas di lapangan;
  - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan.
- 3) Mengoptimalkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyiapkan sarana dan prasarana dari tingkat Polres sampai dengan Polsek di wilayah hukum Polda Kalbar;
  - b) meningkatkan kemampuan personel melalui pendidikan dan latihan secara rutin guna kesiapsiagaan personel.
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ketiga Polda Kalbar Tahun 2021 yaitu **“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”**, antara lain :
- 1) meningkatkan profesionalisme personel Polda Kalbar dalam penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana.  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/ a) penempatan .....



- a) penempatan personel Polda Kalbar sebagai penyidik harus berkualifikasi;
  - b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik Polda Kalbar;
  - c) meningkatkan inovasi pelayanan penyidik fungsi reskrim Polda Kalbar;
  - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang menjadi atensi publik;
  - e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
  - f) pendataan personel Polri yang telah mengikuti diklat khusus penyidikan;
  - g) pengusulan peningkatan personel Polri untuk mengikuti sertifikasi dan peningkatan standar kompetensi penyidik.
- 2) Melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan penyidik Polda Kalbar;
  - b) mengajukan personel Polda Kalbar yang memenuhi syarat sertifikasi penyidik ke LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan peningkatan standar kompetensi penyidik;
  - c) penempatan personel Polda Kalbar sebagai penyidik harus berkualifikasi;
  - d) kompetensi penyidik Polda Kalbar meningkat;
  - e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
  - f) pendataan personel Polda Kalbar yang telah mengikuti diklat khusus penyidikan;

/ 3) Peningkatan .....

- 3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyidikan yang dilakukan oleh Polri berkepastian hukum, tidak berbelarut-larut dan tidak transaksional;
- b) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;
- c) melakukan usulan revisi Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan yang mengatur mekanisme langkah-langkah penyidik secara umum, dinamika progresif hukum, selanjutnya permasalahan teknis dan taktis akan diatur dalam Perkabareskrim yang berisikan SOP yang berbasis ceklis.
- d) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyidik tindak pidana Polda Kalbar;
- e) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- f) melakukan gelar perkara guna mempermudah proses penegakan hukum.

- 4) Peningkatan pengembangan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terinterogasi (SPP-TI-dan e-MP); untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) optimalkan manajemen penyidikan berbasis elektronik secara transparan melalui SPP-TI dan e-MP;
- b) mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
- c) memberikan *Update* berita terbaru informasi kriminal melalui saran internet seperti *intagram*, *youtube* dan *facebook*;

/ d) membangun .....

- d) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan *stakeholders* terkait maupun media massa (media *elektronik*, media cetak dan media *online*).
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ke empat Polda Kalbar Tahun 2021 yaitu **“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Kalbar”**, antara lain:
- 1) Pembenahan Pola Diklat yang siap kerja (Vokasi):  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) ter-*upgrade* nya kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% Teori;
    - b) terlaksananya sertifikasi pendidik dan pengasuh pada sekolah/Pusdik SPN Polda Kalbar;
  - 2) Melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka Strategi yang akan dilakukan:
    - a) terlaksananya penerimaan terpadu anggota Polri (Akpul, SIPSS, Bintara dan Tamtama);
    - b) terlaksananya sosialisasi mengenai aplikasi rekrutmen calon anggota Polri yang dapat diakses oleh seluruh calon peserta rekrutmen;
    - c) terlaksananya pendaftar dengan capaian animo sebanyak 2000 Casis;
    - d) terlaksananya penambahan kuota pendidikan sebanyak 200 siswa;
    - e) terdatanya siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
    - f) penggunaan TIK pada setiap tahapan seleksi TIK Admin;
      - (1) TIK Rikkes dan Psikotes;
      - (2) TIK Kesjas;
      - (3) TIK TPA, Bahasa Inggris;

/ 3) pelaksanaan .....

- 3) Pembinaan karier Personel Polda Kalbar yang berbasis meritokrasi dan kompetensi;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) terpetakannya jenis jabatan dengan kompetensi tertentu;
  - b) terselenggaranya uji kompetensi jabatan;
  - c) terlaksananya assessment bagi personel yang memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka penempatan karier pada tempat yang tepat;
  - d) terlaksananya assessment dalam rangka lelang jabatan secara terbuka;
  - e) terlaksananya uji kompetensi untuk memilih calon pejabat yang memiliki komitmen dan integritas serta kompeten;
  - f) tersusunnya SOP proses Binkar
- 4) Kajian peningkatan Tunkin Polda Kalbar lebih dari 70%;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatnya Nilai AKIP Polda Kalbar Tahun 2020 diharapkan sebesar diatas 75,25;
  - b) meningkatnya Nilai RB Polda Kalbar Tahun 2020 diharapkan sebesar 81,05;
  - c) penilaian apresiasi BPK tentang Perwabkeu Polda Kalbar 8 kali WTP berturut-turut;
  - d) terlaksananya program Zona Integritas Polda Kalbar guna meraih predikat WBK/WBBM.
  - e) meningkatkan profesionalisme personel Polda Kalbar dalam pelaksanaan tugas;

/ 5) Peningkatan .....

- 5) Peningkatan layanan kesehatan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi aparatur Polri di Polda Kalbar;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan upaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan anggota Polri dan ASN Polda Kalbar;
  - b) peningkatan cakupan kepesertaan BPJS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polda Kalbar;
  - c) validasi pendataan aparatur Polda Kalbar dalam kepesertaan BPJS;
  - d) pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Biddokes Polda Kalbar;
  - e) melanjutkan upaya pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar;
  - f) terlaksananya pembekalan latihan keterampilan bagi anggota Polri dan ASN yang akan purna tugas dengan motto “Pensiun Siap Bahagia”;
  - g) terlaksananya pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan bagi anggota Polri dan ASN yang berprestasi;
  - h) terlaksananya perumahan bagi personel Polda Kalbar dengan DP 0%.
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kelima Polda Kalbar Tahun 2021 yaitu: **“Pengembangan Almatsus Kepolisian Polda Kalbar yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”** antara lain:
- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol Polda Kalbar sesuai dengan teknologi terkini;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/ a) pemenuhan .....

- a) pemenuhan Almatsus Polda Kalbar yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;
  - b) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;
  - c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar;
  - d) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar;
  - e) mendukung pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
  - f) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi Alpalkam dan Almatsus Polri.
- 2) pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas satuan kewilayahan Polda Kalbar;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan fasilitas Mako, Rumdin/Barak Polda Kalbar pada lokasi prioritas (14 Polres Jajaran Polda Kalbar, Satbrimob, SPN Polda Kalbar);
  - b) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas berupa Mako, gedung/gudang, rumah dinas/Barak siswa;
  - c) inventarisasi rumah dinas dan penghuninya;
  - d) pengkajian terhadap prototype rumah dinas Polri dengan berbagai tipe/ukuran;
  - e) kerja sama dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Rusun dalam rangka pembangunan perumahan bagi aparaturnya Polri.

/ Menyusun .....

- 3) Menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) melaksanakan pengajuan Alpalkam dan Almatsus Polri;
  - b) melaksanakan penyusunan pemetaan katalogisasi Almatsus dan Alpalkam Polri;
- 4) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar;
  - b) melakukan Anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan Almatsus Polda Kalbar;.
- 5) Modernisasi Sarpras Binmas Polda Kalbar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - tercukupinya peralatan Sarpras Binmas Polda Kalbar yang modern sesuai dengan kebutuhan minimal
- 6) Pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) pengembangan Almatsus Siber Polda Kalbar dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
  - b) rencana pembangunan *Cyber Digital Lab* pada Unit Siber di Kewilayahan Polda Kalbar.
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ke enam Polda Kalbar Tahun 2021 yaitu **“Regulasi dan Sistem Pengawasan Polda Kalbar yang Efektif dan terpercaya”**, antara lain:

/ 1) Penanganan .....

- 1) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dilingkungan Polda Kalbar: untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
  - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
  - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
  - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polda Kalbar di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
  - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
- 2) Penguatan Saber Pungli Polda Kalbar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya bekerjasama dengan unsur terkait di wilayah di Kalbar;
  - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat satuan kewilayahan sampai dengan Polda;
  - c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang membajak program pemerintah;
- 3) Pencegahan Korupsi di internal Polda Kalbar, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/ a) pelaksanaan .....



- a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri;
  - b) melanjutkan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN;
  - c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian.
- 4) Pengawasan berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan;
  - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara *online*.
- 5) Penataan kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien di lingkungan Polda Kalbar;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi;
  - b) ikut melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat kewilayahan Polda, Polres dan Polsek;
  - c) mendukung penyelenggaraan penataan kelembagaan tipe Polres;
  - d) ikut melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polres, Polsek dan Polsubsektor;
  - e) mendukung dalam penyusunan kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan Polri;
  - f) ikut memberikan sumbangan pemikiran terkait tata organisasi Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas kedepan dengan harapan menjadikan organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi.

6) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Kalbar.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pendampingan Satker/Satwil jajaran Polda Kalbar atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerjanya;
- b) mempertahankan capaian Satker/Satwil jajaran Polda Kalbar pada zona integritas yang sudah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan memperjuangkan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) Polda Kalbar berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polresta/Polres dan Satker Polda;
- d) ikut melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan;
- e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta jajaran Polda Kalbar agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
- f) ikut melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan Polda Kalbar dalam inovasi-inovasi pelayanan Publik Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang untuk memperoleh kategori TOP inovasi pelayanan publik;

/ 3. Arah .....

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Landak Tahun 2021

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Landak Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polres Landak sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas Polres Landak yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor industri, pariwisata dan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di wilayah Kabupaten Landak”** yaitu:

- 1) peran Intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial;
- b) terdeteksinya gangguan Kamtibmas (PG, AG, GN) di seluruh wilayah hukum Polres Landak;
- c) tergelarnya operasi intelijen Polres Landak dengan kemampuan deteksi aksi, peringatan dini, cegah dini melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya.
- 2) Meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memetakan potensi terorisme aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

- b) melakukan lidik pamgal dan binlul terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
  - c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
  - d) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, baik secara rutin atau dialogis serta gabungan dengan TNI pada tempat-tempat yang berpotensi rawan kejahatan dan gangguan kamtibmas serta terorisme;
  - e) menghadirkan anggota Polri di setiap kegiatan masyarakat;
  - f) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/VIP yang didukung peralatan dan personel.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui **"Community Policing"**;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan dengan menguatkan program Polmas dengan penggelaran Bhabinkamtibmas satu Polisi satu desa/kelurahan untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan kamtibmas;
  - b) membentuk dan membina kelompok potensi masyarakat;
  - c) pemberdayaan kemitraan dengan lembaga/pranata masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas dalam upaya memelihara dan memantapkan kamtibmas.

/ 4) Penanganan .....

- 4) Penanganan konflik secara humanis  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) antisipasi konflik sosial di seluruh wilayah hukum Polres Landak yang meliputi pilkada, sengketa lahan, kenaikan harga bahan pokok, dan lain lain;
  - b) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas di masyarakat untuk berpartisipasi didalam meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
  - c) melaksanakan penggalangan secara efektif terhadap tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda untuk dapat berperan serta dalam menetralsir konflik yang terjadi di masyarakat;
  - d) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan informasi dan berperan aktif mencegah terjadinya konflik.
- 5) Mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Polres Landak;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas;
  - b) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - c) melakukan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
  - d) mendukung pembangunan back office, dan networking di bidang lalu lintas sebagai implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas guna membangun sistem pelayanan prima kepolisian di bidang lalu lintas;
  - e) membangun budaya tertib lalu lintas;

- f) menghadirkan personel berseragam di tempat-tempat kegiatan masyarakat, sekolah, pasar, tempat ibadah).

6) Meningkatkan peran Polri di wilayah rawan dan bencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan koordinasi dengan BNPB Kabupaten untuk melaksanakan latihan bersama guna penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Landak;
- b) menyiapkan personel dan peralatan SAR yang ada dalam rangka tindakan preemtif dan pencegahan rawan bencana di wilayah hukum Polres Landak;
- c) penanggulangan bencana alam di wilayah hukum Polres Landak dilakukan secara profesional;

7) Penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pendekatan penanganan unjuk rasa secara dialogis dan humanis di wilayah hukum Polres Landak;
- b) penggelaran satuan operasional untuk penanganan unjuk rasa anarkis(Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huruhara)
- c) menyiapkan jumlah kebutuhan kekuatan personel pasukan PHH/ pasukan anti anarkis untuk mem-back up pengamanan unjuk rasa di wilayah Kabupaten Landak;
- d) melaksanakan kegiatan rutin latihan fungsi kepolisian dalam rangka membentuk performa personel yang siap, teruji dan handal dalam upaya menangani berbagai kegiatan pengamanan unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak;

/ e) menyiapkan .....

- e) menyiapkan dan melaksanakan penggelaran sarana dan prasarana secara rutin serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa;
  - f) terjalinnya soliditas dan sinergitas Polri dengan TNI dalam rangka meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Landak;
  - g) terselenggaranya pertemuan periodik Polres Landak dengan K/L, aparat penegak hukum dan Pemda di wilayah Kabupaten Landak;
  - h) melakukan koordinasi dan latihan gabungan Polri dengan TNI.
- 8) Peningkatan kerja sama dalam Negeri;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penguatan kerja sama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya;
  - b) meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak kamling dan menyelesaikan potensi kerawanan sosial;
  - c) membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders terkait.
- b.** Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kedua Polres Landak Tahun 2021 yaitu **“Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polres Landak**; antara lain:
- 1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- / a) pembangunan .....

- a) pembangunan dan peningkatan Faskes Polres Landak dalam rangka pelayanan Kesehatan didalam memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
  - b) peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi secara online yang terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Samsat didalam Registrasi dan identifikasi online yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat;
  - c) pengembangan registrasi dan identifikasi melalui Coaching Clinic Uji praktek SIM dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
  - d) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
- 2) Peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan anggota Polri;
  - b) melaksanakan peningkatan profesionalisme kerja petugas di lapangan;
  - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan.
- 3) Mengoptimalkan *quick response* kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyiapkan sarana dan prasarana sampai ditingkat Polsek di wilayah hukum Polres Landak;
  - b) meningkatkan kemampuan personel melalui pendidikan dan latihan secara rutin guna kesiapsiagaan personel.



- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ketiga Polres Landak Tahun 2021 yaitu **“Penegakan hukum Polres Landak secara berkeadilan dan terpercaya”** antara lain:

1) **Meningkatkan profesionalisme personel Polres Landak dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penempatan personel Polres Landak sebagai penyidik harus berkualifikasi;
- b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik Polres Landak;
- c) meningkatkan inovasi pelayanan penyidik fungsi reskrim Polres Landak;
- d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang menjadi atensi publik;
- e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
- f) penempatan personel Polri yang telah mengikuti diklat khusus penyidikan;
- g) pengusulan peningkatan personel Polri untuk mengikuti sertifikasi dan peningkatan standar kompetensi penyidik.

2) Mengikutsertakan personel melalui sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelatihan dan peningkatan kemampuan penyidik Polres Landak;
- b) mengajukan personel Polres Landak yang memenuhi syarat sertifikasi penyidik ke LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan peningkatan standar kompetensi penyidik;
- c) penempatan personel Polres Landak yang berkualifikasi;
- d) kompetensi penyidik Polres Landak semakin meningkat;

- e) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
  - f) pendataan personel Polres Landak yang telah mengikuti diklat khusus penyidikan;
- 3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penyidikan yang dilakukan oleh Polri berkepastian hukum, tidak berlarut-larut dan tidak transaksional;
  - b) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;
  - c) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyidik tindak pidana Polres Landak;
  - d) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
  - e) melakukan gelar perkara guna mempermudah proses penegakan hukum.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas keempat Polres Landak Tahun 2021 yaitu **“Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Landak”** antara lain:
- 1) Melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip "BETAH" berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) terlaksananya penerimaan terpadu anggota Polri (Akpri, SIPSS, Bintara dan Tamtama);
    - b) terlaksananya sosialisasi mengenai aplikasi rekrutmen calon anggota Polri yang dapat diakses oleh seluruh calon peserta rekrutmen;

- c) meningkatkan animo bagi pendaftar calon anggota Polri;
  - d) terdatanya siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
- 2) Pembinaan karier Personel Polres Landak yang berbasis meritokrasi dan kompetensi;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) terpetakannya jenis jabatan dengan kompetensi tertentu;
  - b) terselenggaranya uji kompetensi jabatan;
  - c) terlaksananya assessment bagi personel yang memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan dalam rangka penempatan karier pada tempat yang tepat;
  - d) terlaksananya uji kompetensi untuk memilih calon pejabat yang memiliki komitmen dan integritas serta kompeten;
  - e) tersusunnya SOP proses Binkar yang mengacu pada meritokrasi dan kompetensi;
- 3) Peningkatan layanan kesehatan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi aparatur Polri di Polres Landak;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan upaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan anggota Polri dan ASN Polres Landak;
  - b) peningkatan cakupan kepesertaan BPJS di lingkungan Polres Landak;
  - c) validasi pendataan aparatur Polres Landak dalam kepesertaan BPJS;
  - d) peningkatan pengembangan pembangunan pada fasilitas Kesehatan di lingkungan Polres Landak;
  - e) terlaksananya pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan bagi anggota Polri dan ASN yang berprestasi;

- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis TIK;  
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) Meningkatkan Profesionalisme personel Polres Landak dalam pelaksanaan Tugas dengan prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis);
  - b) Terlaksananya program Zona Integritas Polres Landak guna meraih predikat WBK / WBBM;
  - c) Terlaksananya pembangunan Satpas Prototype di lingkungan Polres Landak.
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas kelima Polres Landak Tahun 2021 yaitu **“Pengembangan Almatsus Kepolisian Polres Landak yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”** antara lain:
  - 1) Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol Polres Landak sesuai dengan teknologi terkini;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) pemenuhan Almatsus Polres Landak yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;
    - b) melaksanakan pengelolaan tahanan berdasarkan SOP dan prosedural serta Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;
    - c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polres Landak;
    - d) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan alpalkam dan Almatsus Polres Landak;

- e) mendukung pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
  - f) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi Alpalkam dan Almatsus Polri.
- 2) Pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran, rumah dinas di satuan kewilayahan Polres Landak. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Terlaksananya rencana kebutuhan fasilitas Kantor, Rumdin/Barak Polres Landak;
  - b) Menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan dalam usulan pembangunan fasilitas perkantoran Polsek/Polsubsektor di Lingkungan Polres Landak;
  - c) inventarisasi rumah dinas dan penghuninya;
  - d) pengkajian terhadap prototype rumah dinas Polri dengan berbagai tipe/ukuran;
- 3) Evaluasi dan perencanaan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polres Landak; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polres Landak;
  - meningkatkan kebutuhan pengadaan Kantor/Perlengkapan Kantor Polres Landak.
- 4) Modernisasi Sarpras Binmas Polres Landak; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- tercukupinya peralatan Sarpras Binmas Polres Landak yang modern sesuai dengan kebutuhan sampai ke Kewilayahan.

/ 5) Pembangunan .....

- 5) Pembangunan Sarpras berbasis TIK di lingkungan Polres Landak.  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengembangan Alamsus Siber Polres Landak dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
  - b) pengembangan pemasangan CCTV dan jaringan Internet dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana.
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ke enam Polres Landak Tahun 2021 yaitu **“Regulasi dan Sistem Pengawasan Polres Landak yang efektif dan terpercaya”** antara lain:
- 1) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya di lingkungan Polres Landak;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
  - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
  - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
  - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
  - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
- 2) Penguatan Saber Pungli Polres Landak;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/ a) pembangunan .....

- a) Pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan unsur terkait di wilayah hukum Polres Landak;
- b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan Polres Landak;
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polres Landak, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
  - b) meningkatkan pengawasan internal di Polres Landak terhadap personel yang wajib melaporkan LHKPN kepada KPK melalui e-LHKPN;
  - c) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian;
- 4) Pengawasan Berbasis TI, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan;
  - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara *online*.
- 5) Penataan kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien di lingkungan Polres Landak;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
  - a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi;

/ b) Ikut .....

- b) ikut melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat kewilayahan Polres dan Polsek;
  - c) mendukung penyelenggaraan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Polri ;
  - d) ikut melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polsek dan Polsubsektor;
  - e) meningkatkan dan mendukung tata organisasi Polri sesuai kebutuhan dan tantangan tugas kedepan dengan harapan menjadikan organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi.
- 6) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polres Landak.
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pendampingan Satker Polres Landak melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap capaian Kinerja;
  - b) mempertahankan capaian kinerja Polres Landak yang telah berpredikat Baik pada program zona integritas dan berupaya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) Polres Landak berbasis web dan secara online (ITK-O);
  - d) ikut melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat /stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan;



- e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik pada Polres Landak agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
- f) mengikuti bimbingan dan mengikutsertakan Polres Landak untuk berkompetisi dalam Inovasi Pelayanan Publik (IPP) yang tentunya telah memenuhi syarat dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);

/ BAB IV .....

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF

#### IV. Program, Kegiatan dan Usulan Pagu Indikatif

##### 1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Polres Landak Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 program, 30 kegiatan dan 38 output, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. **43.561.723.000,-** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Program Dukungan Manajemen (060.01.14)

Dengan jumlah alokasi anggaran Polri sebesar **Rp. 30.894.036.000,-** (Tiga puluh Miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan tujuan dan kegiatan sebagai berikut:

##### 1) Tujuan :

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor;

##### 2) Kegiatan :

- a) Penerangan Masyarakat;
- b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
- c) Pertanggungjawaban Profesi;
- d) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
- e) Penegakan Tatatertib dan Disiplin Polri;
- f) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan;
- g) Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
- h) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum;
- i) Reformasi Birokrasi Polri;
- j) Manajemen Anggaran;
- k) Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- b. **Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri. (060.01.15)**  
Dengan jumlah Alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.324.472.000,-** dengan tujuan dan kegiatan:

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras.

- c. **Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. (060.01.17)**, dengan jumlah Alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.602.712.000,-** dengan tujuan dan kegiatan :

1) Tujuan :

Terpeliharanya kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan :

- a) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b) Analisis Keamanan;
- c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
- d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
- e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;

- f) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
- g) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
- h) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
- i) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas;
- j) Pembinaan Potensi Keamanan;
- k) Pengendalian Operasi Kepolisian;

d. **Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. (060.01.18)**

dengan jumlah Alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.740.503.000,-** tujuan dan kegiatan:

1) Tujuan :

Terwujudnya stabilitas keamanan dan Ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan :

- a) Penindakan Tindak Pidana Laka Lintas;
- b) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c) Penyelenggaraan Laboratorium Forensik;
- d) Penindakan Tindak Pidana Umum;
- e) Penindakan Tindak Pidana Narkoba;
- f) Penindakan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

/ 2. Pagu .....

## 2. Pagu Indikatif Satker Polres Landak Tahun Anggaran 2021

Tahun Anggaran 2021 Polres Landak melaksanakan 4 Program, 30 kegiatan dan 38 output dengan Alokasi Pagu Indikatif sebesar **Rp. 43.561.723.000,-** (Empat Puluh Tiga Miliar Lima ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen (060.01.14) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 30.894.036.000,-** (Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), meliputi:
  - 1) Penerangan Masyarakat (volume output 46 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 54.110.000,-** (Lima Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 30.672.311.000,-** (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 3) Pertanggungjawaban Profesi (volume output 5 Laporan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.220.000,-** (Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 4) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (volume output 12 Laporan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 29.000.000,-** (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dalam (RM);
  - 5) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri (volume output 16 laporan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.986.000,-** (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 6) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan (volume output 14 Laporan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.289.000,-** (Empat Puluh Juta Dua ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dalam (RM);

/ 7) Pemberian .....

- 7) Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum (volume output 1 Perkara) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) dalam (RM);
  - 8) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (volume output 2 Dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima Juta Rupiah) dalam (RM);
  - 9) Reformasi Birokrasi Polri (volume output 6 Naskah/Dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.899.000,-** (Empat puluh Dua Juta Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 10) Manajemen Anggaran (volume output 4 Naskah/Laporan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.221.000,-** (Sembilan Juta Dua ratus Dua puluh satu Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 11) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (volume output 4 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.000.000,-** ( Satu juta Rupiah) dalam (RM);
- b. Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri (060.01.15) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.324.472.000,-** (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) meliputi:
- Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.324.472.000,-** (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari:
- 1) Layanan Perkantoran Sarpras (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 759.557.000,-** ( Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam (PNBP);
  - 2) Layanan Perkantoran (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.564.915.000,-** ( Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dalam (RM);

/ c. Program .....

- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (060.01.17) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **5.602.712.000,-** ( Lima Miliar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) terdiri dari:
- 1) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.567.687.000,-** (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) meliputi:
    - a) Layanan Dukungan Manajemen Harkamtibmas (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.469.787.000,-** (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan juta Tujuh ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam (PNBP);
    - b) Layanan Perkantoran (volume output 1 Layanan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 97.900.000,-** (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 2) Analisis Keamanan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 175.846.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) meliputi:
    - Layanan Informasi Analisis Keamanan (volume output 214 Dokumen) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 175.846.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam (RM);
  - 3) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 147.152.000,-** (seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) meliputi:
    - a) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Politik (volume output 240 jumlah Laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 145.857.000,-** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam (RM);

- b) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Politik (volume output 240 jumlah Laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.295.000,-** ( satu juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); PNB
- 4) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 182.312.000,-** ( seratus Delapan Puluh Dua juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) meliputi:
  - a) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (volume output 243 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 181.017.000,-** ( Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah); RM
  - b) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (volume output 243 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.295.000,-** ( Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); PNB
- 5) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.285.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Ribu Rupiah) meliputi:
  - a) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya (volume output 253 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 193.990.000,-** ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); RM
  - b) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (volume output 253 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.295.000,-** ( Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); PNB

/ 6) Penyelenggaraan .....



- 6) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.669.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) meliputi:
  - a) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara (volume output 191 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 137.004.000,-** ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah); RM
  - b) Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (volume output 191 Jumlah laporan Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.665.000,-** ( Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); PNBP
- 7) Pembinaan Pelayanan Fungsi sabhara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 238.062.000,- ( Dua ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) meliputi:
  - a) Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (volume output 730 Giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 186.500.000,-** ( Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); RM
  - b) Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (volume output 730 Giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 51.562.000,-** ( Lima Puluh satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah); PNBP
- 8) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital dengan alokasi anggaran **Rp. 103.680.000,-** ( Seratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) meliputi:

/ a) Layanan .....

- Layanan Pembinaan pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional (volume output 1.320 Giat) dengan alokasi anggaran **Rp. 103.680.000,-** (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);PNBP
- 9) Peningkatan pelayanan Keamanan dan keselamatan Masyarakat di Bidang lalulintas dengan alokasi anggaran Rp. 425.793.000,- ( Empat ratus Dua Puluh lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) meliputi:
  - a) Layanan Dukungan manajemen di Bidang Lantas (volume output 12 Layanan) dengan alokasi anggaran **Rp. 111.840.000,-** (Seratus sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); PNBP
  - b) Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas (volume output 30 Giat) dengan alokasi anggaran **Rp. 46.232.000,-** ( Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); PNBP
  - c) Layanan Penegakan hukum Lalu Lintas (volume output 323 Giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.106.000,-** (Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Rupiah); PNBP
  - d) Layanan Turjawali lalu Lintas (volume output 936 giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 189.600.000,-** ( seratus Delapan Puluh Sembilan juta Enam ratus Ribu Rupiah); PNBP
  - e) Layanan Informasi Budaya Tertib lalu Lintas (volume output 359 Giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 71.015.000,-** (Tujuh Puluh satu Juta Lima Belas Ribu rupiah); PNBP
- 10) Pembinaan Potensi Keamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.369.174.000,- ( Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) melalui:

/ a) Pemberdayaan .....

- a) Pemberdayaan Potensi Keamanan (volume output 732 Kegiatan) dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 416.505.000,-** (Empat Ratus enam Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah); RM
  - b) Pemberdayaan Potensi Keamanan (volume output 732 Kegiatan) dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 121.234.000,-** (seratus Dua Puluh satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah); PNB
  - c) Penguatan Peran Bhabinkamtibmas (volume output 12.699 Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 825.435.000,-** ( Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); RM
  - d) Penguatan Peran Bhabinkamtibmas (volume output 12.699 Kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.000.000,-** ( Enam Juta Rupiah) PNB
- 11) Pengendalian Operasi Kepolisian dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. **59.052.000,-** (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) melalui:
- Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian (volume output 2 Giat) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 59.052.000,** (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ; RM
- d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.740.503.000,-** ( Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari:
- 1) Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 142. 506.000,-** (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) melalui:
    - a) Penanganan Tindak Pidana Laka Lantas (volume output 93 Kasus) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142. 506.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah); PNB

- 2) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.600.000,-** ( Tujuh Juta Enam ratus Ribu Rupiah) melalui:
  - Hasil Pemeriksaan Identifikasi (volume output 9 Hasil Pemeriksaan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.600.000,-** ( Tujuh Juta Enam ratus Ribu Rupiah); RM
- 3) Penyelenggaraan Laboratorium Forensik dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 4.000.000,-** ( Empat Juta Rupiah) melalui:
  - Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik (volume output 11 Hasil Pemeriksaan) alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.000.000,-** ( Empat juta Rupiah); RM
- 4) PenindakanTindak Pidana Umum dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.601.009.000,-** (Satu Miliar Enam ratus Satu Juta Sembilan Ribu Rupiah) melalui:
  - Penanganan Tindak pidana Umum (volume output 470 Jumlah Penanganan TP) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.601.009.000,-** (Satu Miliar Enam ratus Satu Juta Sembilan Ribu Rupiah); RM
- 5) Penindakan Tindak Pidana Narkoba dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 579.600.000,-** ( lima ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui:
  - Penanganan Tindak Pidana Narkoba (volume output 23 Jumlah Penanganan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 579.600.000,-** ( lima ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); RM
- 6) Penindakan Tindak Pidana Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 388.788.000,-** ( Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan ribu Rupiah) melalui:

- penanganan Tindak Pidana Korupsi (volume output 2 Jumlah Penanganan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 388.788.000,-** ( Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan ribu Rupiah); RM
- 7) Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.000.000,-** ( Tujuh Belas Juta Rupiah) melalui:
  - Bantuan Penanganan Tindak Pidana (volume output 4 Jumlah Bantuan) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.000.000,-** ( Tujuh Belas Juta Rupiah); RM

Disampaikan bahwa total Pagu Indikatif pada Rencana Kerja dan Anggaran Polres Landak Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 43.561.723.000,-** ( Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan 4 Program, 30 Kegiatan dan 38 Output.

Dengan rincian per-program yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen Internal Polri sebesar **Rp. 30.894.036.000,-** ( Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); 2. Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana dan Prasarana sebesar **Rp. 4.324.472.000,-** ( Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah); 3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar **Rp. 5.602.712.000,-** ( Lima Miliar Enam ratus Dua Juta Tujuh ratus Dua Belas Ribu Rupiah); 4. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar **Rp. 2.740.503.000,-** ( Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima ratus Tiga Ribu Rupiah).

Jika dibandingkan dengan Alokasi Pagu Satker Polres Landak sebelumnya di Tahun 2020 sebesar Rp. 45.187.087.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.625.364.000,- ( Satu Miliar Enam Ratus Dua puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), atau sebesar 3.73 %.

/ Komposisi .....

Komposisi kebutuhan anggaran pada Pagu Indikatif Polres Landak Tahun Anggaran 2021, dilihat dari Per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Rincian Pagu Indikatif Polres Landak Tahun Anggaran 2021 Per Jenis Belanja:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
a)	Belanja Pegawai	30.153.505.000
b)	Belanja Barang	13.408.218.000
c)	Belanja Modal	-

- 2) Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 per sumber anggaran sebagai berikut:

No.	Sumber Anggaran	Pagu (Rp)
a.	Rupiah Murni	41.804.041.000
b.	PNBP	1.757.682.000

- 3) Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 per Program sebagai berikut:

No.	Program	Pagu (Rp)
a.	Program Dukungan Manajemen	30.894.036.000
b.	Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri	4.324.472.000
c.	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.602.712.000
d.	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.740.503.000
	JUMLAH	43.561.723.000

/ 4) Rincian .....

4) Rincian Pagu Indikatif Sub Satker Polres Landak Tahun Anggaran 2021:

a)	Bag Ops Polres Landak	Rp.	277.732.000
b)	Bag Ren Polres Landak	Rp.	233.661.000
c)	Bag Sunda Polres Landak	Rp.	3.822.761.000
d)	Sat Intelkam Polres Landak	Rp.	652.324.000
e)	Sat Reskrim Polres Landak	Rp.	1.384.322.000
f)	Sat Narkoba Polres Landak	Rp.	595.900.000
g)	Sat Tahti Polres Landak	Rp.	68.600.000
h)	Sat Sabhara Polres Landak	Rp.	172.242.000
i)	Sat Lantas Polres Landak	Rp.	652.399.000
j)	Sat Binmas Polres Landak	Rp.	342.179.000
k)	Sie Propam Polres Landak	Rp.	79.906.000
l)	Sie Keuangan Polres Landak	Rp.	30.624.783.000
m)	Sie Pengawasan Polres Landak	Rp.	50.889.000
n)	Sie Umum Polres Landak	Rp.	25.135.000
o)	Sie Tipol Polres Landak	Rp.	230.461.000
p)	SPKT Polres Landak	Rp.	394.150.000
q)	Polsek Ngabang	Rp.	581.181.000
r)	Polsek Sengah Temila	Rp.	373.808.000
s)	Polsek Mandor	Rp.	439.184.000
t)	Polsek Sebangki	Rp.	355.438.000
u)	Polsek Menjalin	Rp.	316.453.000
v)	Polsek Mempawah Hulu	Rp.	383.633.000
w)	Polsek Menyuke	Rp.	358.823.000
x)	Polsek Meranti	Rp.	315.253.000
y)	Polsek Kuala Behe	Rp.	315.253.000
z)	Polsek Air Besar	Rp.	315.253.000
JUMLAH		Rp.	<b>43.561.723.000</b>

/ 5) Kegiatan ....

- 5) kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Landak T.A. 2021
- a) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
  - b) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba dan penegakan hukum lainnya di daerah hukum Polres Landak guna mendukung tercapainya sasaran prioritas Kapolri Tahun 2021;
  - c) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polres Landak, penanganan gejala sosial, penanganan kasus menonjol, terorisme dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi di Lingkungan Polres Landak;
  - d) melaksanakan pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polres Landak, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
  - e) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas Polsek melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
  - f) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Landak;
  - g) pemberian Bantuan dan Nasehat hukum kepada Institusi, pegawai Negeri pada Polri dan Keluarga Polri serta Penyuluhan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan;

/ BAB V. ....



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. Penutup**

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Landak Tahun Anggaran 2021 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kerja Polres Landak Tahun anggaran 2021.

Ngabang, Agustus 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANDAK

ADE KUNCORO RIDWAN, S.I.K  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030874

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH KALIMANTAN BARAT  
 RESOR LANDAK

**RENCANA KERJA TAHUNAN POLRES LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)				KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
1	2		3	4	5
S1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak	3,6	
SS1	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	65,78	
SS2	Terwujudnya Penegakan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Penegakan Hukum	81,75	
SS3	Terwujudnya SDM Polres Landak yang Profesional	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Landak	87,33	
SS4	Modernisasi teknologi terkini	IKP2	Persentase pemenuhan Alkom Polres Landak	6,01 %	
		IKP3	Persentase pemenuhan Almatsus Polres Landak	23,00 %	
		IKP4	Persepsi Kemudahan Akses Data	3	
SS5	Terwujudnya good governance dan Clean Government	IKP5	Nilai AKIP	72,10	
		IKP6	Nilai Reformasi Birokrasi	77	
SS6	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	IKP7	Nilai Kinerja Anggaran (IKPA)	95,5	
SS7	Terwujudnya Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif	IKP8	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	
		IKP9	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100 %	

Ngabang, Agustus 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANDAK

ADE KUNCORO RIDWAN, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030874